

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 sebagai laporan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan gambaran pelaksanaan tugas tahunan SKPD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengandung realisasi yang dicapai pada tiap program/kegiatan tahun 2016. Sasaran dan tujuan dari seluruh tugas yang dilaksanakan dinas adalah untuk kemajuan masyarakat NTB dalam Bidang Transportasi Komunikasi dan Informasi. Diharapkan dengan seluruh program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat umum.

Penyusunan laporan ini selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA maupun DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan pada Sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika dimasa mendatang.

Mataram, Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. L. Bayu W, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610422 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL/GRAFIK	3
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
I.1. Gambaran Umum	8
I.2. Visi dan Misi Organisasi	8
I.3. Struktur Organisasi	10
I.4. Kondisi Sektor Perhubungan.....	12
I.5. Prasarana Angkutan Darat :	17
I.6. Transportasi Laut	18
I.7. Transportasi Udara	20
I.8. Kondisi Sektor Komunikasi dan Informasi.....	22
I.9. Isu Strategis	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
II.1 Perencanaan Kinerja.....	26
II.2 Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
III.2 Realisasi Anggaran.....	91
BAB IV.....	106
PENUTUP	106
V.1. Hambatan dan Permasalahan	106
V.2. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah	107
Lampiran – Lampiran	108

DAFTAR TABEL/GRAFIK

TABEL 1	: ISU- ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	24
TABEL 2	: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	27
TABEL 3	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT SESUAI RPJMD 2013 – 2018	35
TABEL 4	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
TABEL 5	: SASARAN STRATEGIS 1 TERSEDINYA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI YANG MEMADAI	41
TABEL 6	: SASARAN STRATEGIS 2 TERSEDINYA JARINGAN TRANSPORTASI UDARA YANG MEMADAI	41
TABEL 7	: PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA	42
TABEL 8	: SASARAN STRATEGIS 3 TERSEDINYA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT	44
TABEL 9	: PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT	45
TABEL 10	: SASARAN STRATEGIS KE 4 TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG SEIMBANG DAN PROPORSIONAL	47
TABEL 11	: PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	48
TABEL 12	: SASARAN STRATEGIS KE 5 TERSEDINYA DATA DAN LAYANAN INFORMASI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	49
TABEL 13	: SASARAN STRATEGIS KE 6 TERSEDINYA SIARAN/INFORMASI YANG EDUKATIF	53
TABEL 14	: PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	53
TABEL 15	: SASARAN STRATEGIS KE 7 TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG MEMADAI	55
TABEL 16	: PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	56
TABEL 17	: SASARAN STRATEGIS KE 8 MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	57
TABEL 18	: PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	58
TABEL 19	: SASARAN STRATEGIS KE 9 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BAGI MASYARAKAT	58
TABEL 20	: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	60
TABEL 21	: SASARAN STRATEGIS KE 10 MENINGKATNYA KETERPADUAN SISTEM POS DAN TELEKOMUNIKASI	62
TABEL 22	: PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI	63
TABEL 23	: SASARAN STRATEGIS KE 11 MENINGKATNYA FASILITASI KOMISI INFORMASI	64
TABEL 24	: PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	64
TABEL 25	: SASARAN STRATEGIS KE 12 MENINGKATNYA PEMANTAUAN , EVALUASI DAN PELAPORAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	65
TABEL 26	: PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	66

TABEL 27	: PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016	67
TABEL 28	: PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 DENGAN TARGET RENSTRA	78

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DISHUBKOMINFO TAHUN 2016	12
--	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, merupakan gambaran tentang capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2013 – 2018.

Siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, yang meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam Penetapan Kinerja.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada tahun 2016 ini adalah tahun ketiga dari 5 tahap pembangunan Nusa Tenggara Barat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 11 (sebelas) program unggulan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 secara fisik telah mencapai 96,72% dan secara keuangan 93,73%. Hasil capaian kinerja tersebut, lebih memotivasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi secara maksimal terhadap program kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program tersebut terdiri dari Program Rutin Kesekretariatan, Program pada Urusan Perhubungan dan Program pada Urusan Komunikasi dan Informatika.

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB maka ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran perencanaan kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Terdapat 12 Sasaran dengan 57 indikator kinerja yang ditarget pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB pada tahun 2016. Sasaran yang harus dicapai tersebut adalah:

1. Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi yang Memadai
2. Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi Udara yang Memadai Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi Laut yang Memadai
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Seimbang / Proporsional Tersedianya Data dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Tersedianya Siaran / Informasi yang Edukatif Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai
5. Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat
7. Meningkatnya Keterpaduan Sistem Pos dan Telekomunikasi
8. Meningkatnya Fasilitas Komisi Informasi
9. Meningkatnya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Secara umum seluruh sasaran-sasaran dengan indikator yang ditetapkan diatas dapat dicapai dengan progress fisik kegiatan mencapai 100 %,,. Didalam pelaksanaan program dan kegiatan tentu terdapat hambatan dan halangan tetapi tantangan tersebut dapat diselesaikan dimana hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya Indikator RPJMD yang diamanahkan kepada Dishubkominfo yaitu indikator ke 29 yaitu jumlah penumpang Angkutan Udara dan Angkutan Laut. Target jumlah penumpang angkutan udara berhasil melewati target RPJMD tahun 2016 sebanyak 3.298.000 orang dimana terealisasi sejumlah 3.778.787 orang, begitu juga dengan angkutan laut terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dari 801.043 pada tahun 2015 menjadi 1.071.173 orang yang jauh melewati target RPJMD sejumlah 172.025 orang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memotori pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, senantiasa mengupayakan berbagai program pembangunan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Jasa Transportasi dan Informasi yang tepat waktu.

Ruas jalan menerus dan berada di beberapa Kabupaten/Kota merupakan tantangan tersendiri didalam penetapan kebijakan bidang transportasi, terlebih lagi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Koordinasi secara periodik dan kontinyu terus dilaksanakan baik secara vertikal kelembagaan maupun melalui pemerintah daerah masing - masing Kabupaten/Kota.

Pembangunan beberapa infrastruktur transportasi yang terdiri dari Bidang Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara baik melalui anggaran APBN maupun APBD adalah sebagai bentuk perwujudan dari perhatian pemerintah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat dan terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan transportasi yang memadai. Begitu pula halnya dengan Bidang Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terus menggalakkan program penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang Transportasi Komunikasi dan Informasi, Dishubkominfo berkewajiban memberikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Kinerja yang dibuat pada awal tahun 2015, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2. Visi dan Misi Organisasi

Untuk mendukung pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan visi dan misinya sesuai

dengan tujuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Perda Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 yaitu :

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah : ***“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”***dengan Misi :

1. Mempercepat Perwujudan Masyarakat yang Berkarakter;
2. Mengembangkan Budaya dan Kearifan Lokal untuk Pembangunan;
3. Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Melayani, Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dan Memantapkan Stabilitas Keamanan;
4. Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia yang Berdayasaing
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan, dan Mengembangkan Keunggulan Daerah;
6. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah Berbasis Tata Ruang;
7. Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang Handal”

Misi:

1. Meningkatkan Konektifitas, Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Darat;
2. Meningkatkan Konektifitas, Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Laut;
3. Meningkatkan Konektifitas, Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Transportasi Udara;
4. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
5. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informasi;
6. Meningkatkan Ketepatan dan Keakuratan Data dan Informasi Pembangunan;
7. Meningkatkan Ketersediaan dan Keberlangsungan Penyebaran Informasi Publik;
8. Mendorong Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal Dinas.

I.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas cukup memadai di bidangnya, peningkatan kualitas tersebut juga tetap dilakukan untuk mengimbangi pengetahuan pegawai dengan perkembangan teknologi.

Sampai dengan bulan Desember 2016 terdapat 136 orang berstatus PNS dan 3 orang PTT dengan perincian 98 pegawai laki-laki dan 41 pegawai perempuan, yang terbagi dalam 4 golongan yaitu :

- Golongan IV : 9 orang
- Golongan III : 81 orang
- Golongan II : 46 orang
- Golongan I : 0 orang
- PTT : 3 orang

Sedangkan pejabat struktural terdiri dari :

- Pejabat Eselon II : 1 orang
- Pejabat Eselon III : 8 orang
- Pejabat Eselon IV : 24 orang
- Staf Lainnya (PNS) : 99 orang
- Pejabat Fungsional : 4 orang
- Pegawai Tidak Tetap/PTT : 3 orang
- Berdasarkan latar belakang pendidikan
 - Pasca Sarjana (S2) : 7 orang
 - Sarjana (S1) : 57 orang
 - Diploma III : 11 orang
 - Diploma II : 1 orang
 - SMU/SMK : 59 orang
 - SLTP : 4 orang
 - SD : 0 orang

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perhubungan Darat
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional
 - b. Seksi Angkutan Darat
 - c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
4. Bidang Perhubungan Laut
 - a. Seksi Angkutan Laut
 - b. Seksi Kepelabuhan
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran
5. Bidang Perhubungan Udara
 - a. Seksi Angkutan Udara
 - b. Seksi Kebandar Udara
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan
6. Bidang Pos dan Telekomunikasi
 - a. Seksi Pelayanan Pos
 - b. Seksi Telekomunikasi
 - c. Seksi Layanan Teknis
7. Bidang Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informatika
 - a. Seksi Kelembagaan Komunikasi
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi
 - c. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

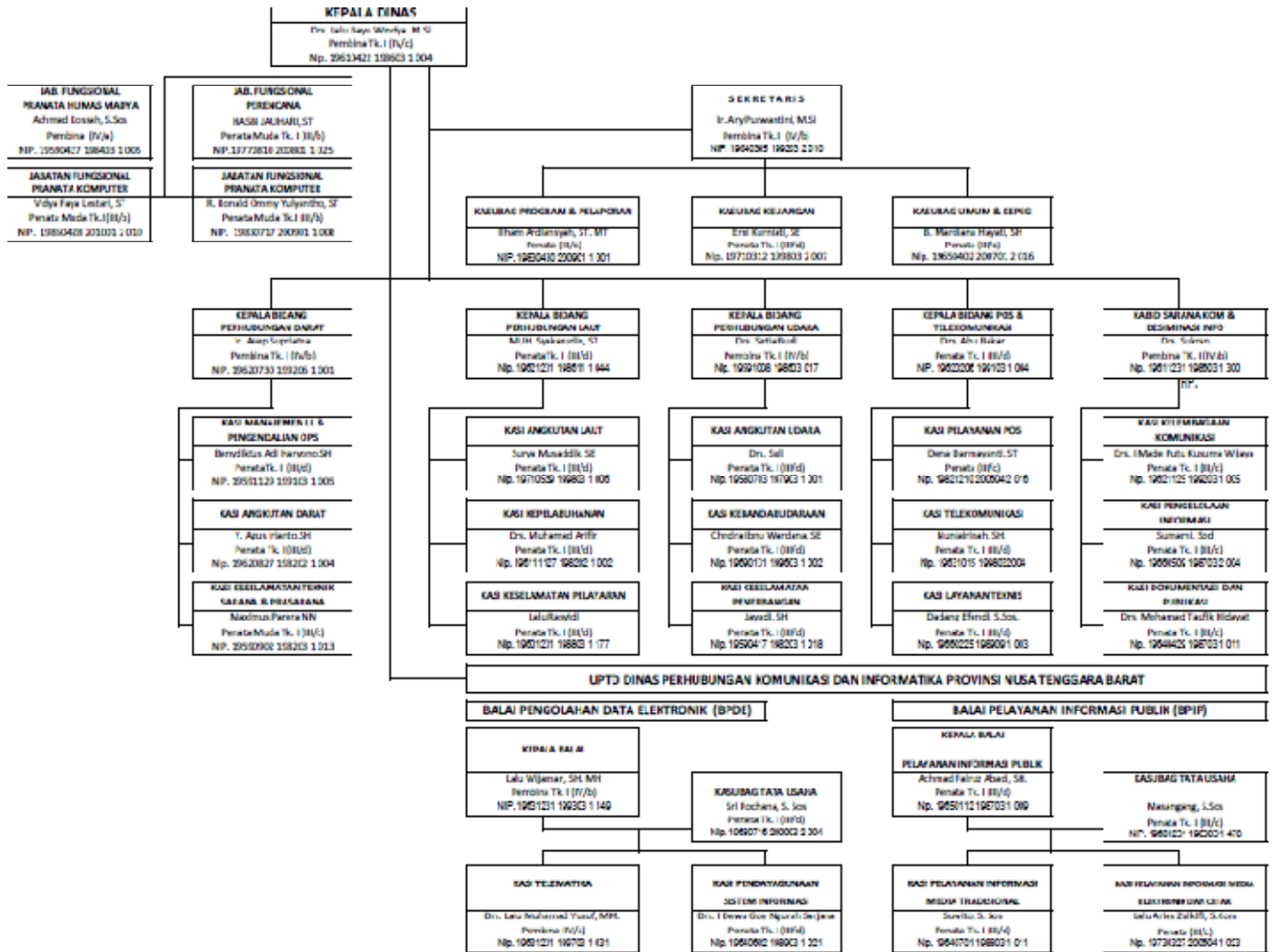
UPTD di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB adalah :

1. Balai Pelayanan Informasi Publik (BPIP)
 - a. Subbag Tata Usaha
 - b. Seksi Pelayanan Informasi Media Tradisional
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Media Elektronik dan Cetak
2. Balai Pengolahan Data Elektronik (BPDE)
 - a. Subbag Tata Usaha
 - b. Seksi Telematika
 - c. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

Disamping itu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan atasan langsung dari jabatan fungsional, yaitu :

1. Jabatan Fungsional Pranata Humas
2. Jabatan Fungsional Perencana
3. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DISHUBKOMINFO TAHUN 2016



Mataram, Desember 2016
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Drs. Lulu Rayu Windya, M.Si
NIP.19610421 198603 1 004

I.4 Kondisi Sektor Perhubungan

Kondisi perkembangan Transportasi Angkutan Darat dan Angkutan Penyeberangan di wilayah NTB tidak lepas dari faktor pendanaan, dimana pendanaan suatu kegiatan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, disamping didukung oleh

perencanaan yang sistematis dan terintegrasi. Pengembangan Transportasi Angkutan Darat maupun Angkutan Penyeberangan di wilayah NTB diarahkan guna meningkatkan konektivitas antar moda transportasi baik transportasi darat, laut dan udara, sehingga dengan sinergitas dari sistem jaringan angkutan dapat terwujud dan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan lancar, aman, nyaman dan tepat waktu. Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang cukup, layak dan memadai.

1.4.1. Transportasi Darat dan Penyeberangan

a. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) :

Pelayanan Angkutan umum yang melayani wilayah perkotaan khususnya yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang melayani angkutan Orang dan barang di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB yang terdiri dari 59 Jaringan trayek sesuai dengan Keputusan Gubernur No . 137 Tahun 1999, Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak berbeda halnya dengan angkutan umum lainnya, merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan yang memiliki kepentingan tujuan perjalanan di kota lain diluar kota tempat tinggalnya. Selain itu, angkutan AKDP ini juga difungsikan untuk menekan penggunaan angkutan pribadi yang tidak menjadi efektif dan efisien mengingat jarak perjalanan yang panjang, terlebih lagi dengan adanya peningkatan upaya pelayanannya, AKDP menjadi pilihan yang lebih tepat dalam melakukan perjalanan. Selain itu angkutan AKDP dapat juga sebagai pengumpul dan penyebar (Hub and Spoke) dari Angkutan Perkotaan maupun pedesaan dalam mendukung proses laju perekonomian suatu wilayah dalam satu lingkup Provinsi, baik wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 berjumlah 443 unit dengan berbagai lintasan trayek pada 10 Kabupaten/Kota.

b. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) :

Untuk melayani masyarakat yang ingin berpergian keluar kota di luar Provinsi NTB, masyarakat diberikan layanan Angkutan Kota Antar

Provinsi (AKAP) yang melayani lintasan antar Provinsi antara lain Provinsi, NTB, Bali dan beberapa Provinsi di Pulau Jawa. Peranan dari Angkutan tersebut sangat penting guna meningkatkan mobilitas angkutan orang dan jasa yang ada di NTB. Armada/bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat dikelola oleh 7 perusahaan jumlah armada 58 unit melayani dengan rute/trayek menuju Denpasar, Surabaya, Malang, Semarang, Jogjakarta dan Jakarta.

c. Angkutan Pemasu Moda :

Angkutan Pemasu Moda yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melayani Lombok Internasional Airport (LIA) dengan beberapa simpul bangkitan yaitu LIA-Senggigi, LIA-Mataram, dan LIA-Selong. Keberadaan angkutan ini dari hari ke hari keberadaannya semakin diminati oleh masyarakat karena memberikan kepastian pelayanan yang cukup nyaman, jadwal yang teratur dan tarif yang terjangkau.

d. Angkutan Taksi :

Angkutan Taksi yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain terdiri dari beberapa pengusaha lokal dan pengusaha dari luar daerah (nasional) antara lain perusahaan Taksi Blue Bird dan Express Group dan Rangka taxi. Sampai dengan tahun 2016 ini, total ada sekitar 702 unit taksi yang beroperasi di Provinsi NTB.

e. Angkutan Pariwisata :

Selain beberapa Angkutan Umum, ada beberapa moda transportasi yang sering digunakan di wilayah Provinsi NTB khususnya di daerah Pariwisata, karena Provinsi NTB merupakan daerah destinasi wisata dan merupakan salah satu pintu gerbang pariwisata di Indonesia maka Angkutan Pariwisata yang berkembang dan menjadi andalan bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah pariwisata antara lain Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Kute, Tanjung Ann dan beberapa tempat wisata baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. adapun Perusahaan Angkutan Pariwisata yang beroperasi di wilayah Provinsi NTB berjumlah 87 unit.

f. Angkutan Antar Jemput :

Angkutan lain yang melayani lintasan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu Angkutan Antar Jemput yang beroperasi melayani Mataram - Sumbawa Besar, Ada 4 perusahaan Angkutan Antar Jemput yang beroperasi di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa yaitu Pancasari, Sumbawa Utama, Tiara Mas dan Titian Mas.

g. Angkutan Sewa :

Di wilayah Provinsi NTB ada 89 unit Angkutan Sewa yang melayani baik untuk para wisatawan yang berwisata di pulau Lombok maupun orang – orang yang melakukan kegiatan baik kegiatan Dinas maupun perusahaan.

h. Angkutan Perintis :

Untuk melayani beberapa daerah yang terpencil dan terisolir diperlukan angkutan transportasi yang mampu melayani daerah yang belum terjangkau oleh transportasi sehingga untuk melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan segala bidang yang berada di daerah terpencil diperlukan moda transportasi yang memadai dan secara teratur melayani penumpang dan barang untuk dibawa dari dan ke beberapa daerah terpencil tersebut. Angkutan Perintis Antar Kota (Daerah Terpencil) Angkutan perintis yang melayani daerah terpencil di wilayah Provinsi NTB antara lain berada di Pulau Sumbawa dan di Pulau Lombok yang belum terlayani oleh Angkutan AKDP maupun Angkutan Pedesaan sehingga melalui Anggaran Kementerian Perhubungan telah dilakukan pelaksanaan Subsidi Operasi Angkutan Perintis ke pulau Sumbawa dan pulau Lombok yang terdiri dari 7 Trayek, meliputi :

1. Sumbawa Besar – Tolo'oi;
2. Mataram – Sumbawa Besar - Matta;
3. Mataram – Sumbawa Besar-Sampar goal;
4. Mataram – Sumbawa Besar - Orong Telu;
5. Mataram – Sumbawa Besar - Moyo Hilir;

6. Mataram – Praya - Teluk Awang;

7. Mataram – Sumbawa Besar - Ropang,

Dengan adanya angkutan perintis ini maka diharapkan aksesibilitas penumpang baik orang dan barang dapat terlayani dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat meningkat serta daerah tersebut dapat berkembang sebagaimana daerah-daerah yang lain.

i. **Angkutan Massal Perkotaan/Bus Rapid Transit (BRT)**

Pada tahun 2016 telah ditetapkan 4 (empat) koridor pengoperasian BRT melalui SK Gubernur nomor 550 – 536 tanggal 1 Juni tahun 2016. Koridor ini akan dikembangkan sesuai dengan jumlah bus dan kapasitas jalan yang tersedia sehingga akan terwujud sistem angkutan massal yang handal dan terintegrasi. Sampai dengan tahun 2016 terdapat 25 Bus BRT yang melayani 4 koridor. Beroperasinya BRT ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Mataram yang mulai meningkat. Operasi BRT ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi yang layak, aman, nyaman dan terjangkau.

1.4.2. Sarana Transportasi Penyeberangan :

a. **Pelabuhan Penyeberangan Lembar :**

Pelabuhan Penyeberangan Lembar yang berada di Provinsi NTB merupakan satu-satunya penghubung antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Lintasan ini merupakan lintasan komersial di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Pelabuhan penyeberangan Lembar menjadi pintu masuk Provinsi NTB dari wilayah barat, dikembangkan untuk melayani angkutan barang maupun pariwisata yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. Pelabuhan ini berlokasi di Kabupaten Lombok Barat bagian selatan yang berdekatan dengan Pelabuhan Laut Lembar.

b. **Pelabuhan Penyeberangan Kayangan – Pototano :**

Pelabuhan ini merupakan Pelabuhan Penyeberangan lintasan antar pulau yang masuk dalam Provinsi NTB. Pelabuhan tersebut menghubungkan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang melayani beberapa

angkutan kendaraan dan barang serta para penumpang yang akan melakukan perjalanan sehingga lintasan ini merupakan lintasan strategis yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Lintasan ini juga merupakan lintasan komersil sehingga pengelolaannya dilakukan oleh PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry.

c. Pelabuhan Penyeberangan Sape :

Pelabuhan ini melayani 2 lintasan antara lain Lintasan Sape -Waikelo dan lintasan Sape – Labuan bajo. Pelabuhan Penyebrangan Sape menjadi pintu masuk NTB dari wilayah timur. Pelabuhan ini dikembangkan menjadi pintu masuk ke arah Pulau Komodo yang juga merupakan salah satu kunjungan wisata di dunia sehingga peranan pelabuhan ini sangat penting dalam melayani mobilitas barang dan penumpang serta kendaraan yang menuju ke wilayah timur Indonesia.

I.5. Prasarana Angkutan Darat :

a. Fasilitas Keselamatan Jalan :

Guna mengatasi permasalahan kaitannya dengan keselamatan jalan dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun infrastruktur Fasilitas Keselamatan Jalan baik dari anggaran APBD Provinsi maupun APBN Kementerian Perhubungan yang antara lain terdiri dari :Rambu, Marka, Pagar Pengaman Jalan, Traffic Light dan Warning Light.

b. Terminal :

Terdapat beberapa Terminal Bus yang terdiri dari beberapa Type Terminal antara Lain Terminal Type A, Type B, Type C yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB. Terminal tersebut digunakan baik untuk bus AKDP, AKAP juga untuk angkutan umum dan angkutan pedesaan. Terminal bus merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan inter dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Prasarana terminal penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Nusa Tenggara Barat sebanyak 22 terminal,

yang terdiri dari 3 (tiga) terminal tipe A, 6 (enam) terminal tipe B, 13 (tiga belas) terminal tipe C.

c. Jembatan Timbang :

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 2 (dua) unit Jembatan Timbang yang beroperasi saat ini yaitu Jembatan Timbang Bertais dan Jembatan Timbang Pototano. Kegunaan dari jembatan timbang ini yaitu untuk mengontrol dan pengawasan terhadap angkutan barang yang masuk dan keluar Provinsi NTB, guna pengawasan terhadap Tonase Kendaraan yang melebihi batas berat yang telah ditentukan.

d. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) :

Pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang berada di Provinsi NTB disebut juga Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelandan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit PKB masing-masing Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dimana pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Adapun jumlah pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beroperasi sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 sebanyak masing-masing 10 unit.

I.6. Transportasi Laut

Jaringan pelayanan Transportasi Laut berupa pelabuhan, dan mengacu Peraturan Kemenhub No. KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), dimana terdapat 5 (lima) Pelabuhan Pengumpul, 4 (empat) Pelabuhan Regional dan 17 (tujuh belas) Pelabuhan Lokal yang berada di Provinsi NTB, yaitu :

a. Pelabuhan Pengumpul

Berfungsi melayani kegiatan dan alih muat penumpang dan barang nasional, mampu menangani semi kontainer dengan volume kegiatan bongkar muat

- Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;

- Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa;
 - Pelabuhan Bima di Kota Bima.
 - Pelabuhan Labuan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Pelabuhan Pengumpan Regional
- Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Regional antara lain :
- Pelabuhan Pemenang/Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara;
 - Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima;
 - Pelabuhan Sape (Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan) di Kabupaten Bima.
- c. Pelabuhan Lokal :
- Berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota, yang termasuk Pelabuhan Lokal antara lain:
- Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;
 - Pelabuhan Ampenan (tarsus) di Kota Mataram;
 - Pelabuhan Labuan Haji di Lombok timur;
 - Pelabuhan Alas di Sumbawa;
 - Pelabuhan Jeranjang (tarsus) di Lombok Barat;
 - Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
 - Pelabuhan Teluk Awang (perikanan) di Lombok Barat;
 - Pelabuhan Tawun di Lombok Barat;
 - Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur;
 - Pelabuhan Telong-elong di Lombok Timur;
 - Pelabuhan Kayangan (ASDP) di Lombok Utara;
 - Pelabuhan Kartasari (tarsus) di Sumbawa;
 - Pelabuhan Labangka di Sumbawa;
 - Pelabuhan Jambu (pelra) di Sumbawa;
 - Pelabuhan pulau Moyo di Sumbawa;
 - Pelabuhan Labuan Lalar di Kabupaten Sumbawa;
 - Pelabuhan Pototano (ASDP) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat selain melayani angkutan barang dan orang secara Liner (terjadwal) dan Tramper (Tidak Berjadwal) terdapat juga tiga rute yang melayani trayek perintis dan dianggarkan melalui Kementerian Perhubungan RI dimana rute tersebut melewati berbagai pelabuhan di wilayah Tengah dan Timur Indonesia dengan rute:

1. **Bima** – Pulau Sailus – **Calabahai** – **Badas** – **Calabahai** – Pulau Sailus – **Bima** – Reo – Selayar – Makassar – Selayar – Reo – **Bima**.
2. **Bima** – Jamea – Makassar – Selayar – Jamea – **Bima** – Waikelo – Ende – Pulau Raijua – Sabu/Seba – Pulau Raijua – Ende – Waingapu – Waikelo – **Bima**.
3. **Bima** – **Kilo** – **Pulau Moyo** – **Badas** – Tanjung Wangi – Sepeken – Pagerungan Besar – Kangean – Sapudi – Kalianget – Masalembo – Keramaian – Masalembo – Surabaya – Masalembo – Keramaian – Masalembo – Kalianget – Sapudi – Kangean – Pagerungan Besar – Sepeken – Tanjung Wangi – **Badas** – **Pulau Moyo** – **Kilo** – **Bima**.

I.7. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu simpul jasa distribusi angkutan udara yang mendukung arus perdagangan dan wisata merupakan penunjang bagi kebijakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana terdapat 3 (tiga) Bandara, 1 (satu) Bandara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Angkasa Pura I(Persero) yaitu : Lombok International airport (LIA) di Kabupaten Lombok Tengah. Dua Bandara lainnya yaitu Bandara Sultan M. Kaharuddin di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa dan Bandara Sultan M. Salahuddin Bima di Kabupaten Bima, merupakan bandara domestik yang dikelola oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Disamping itu terdapat 1 (satu) bandara khusus berupa “air strip/water base” di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat yang dioperasikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT).

a. Lombok International Airport (LIA) :

Terdapat 7 (tujuh) Rute Penerbangan Domestik berjadwal yang dilayani melalui LIA :

- Lombok – Jakarta (LOP – CGK) dan (LOP – HLP) dengan menggunakan 3 (tiga) Maskapai:

- Garuda Indonesia
- Lion Mentari Air
- Batik Air Indonesia
- Lombok – Yogyakarta (LOP – JOG) yang dilayani oleh 1 (satu) maskapai:
 - Lion Mentari Air
- Lombok – Surabaya (LOP – SUB) dilayani oleh 3 (tiga) Maskapai:
 - Garuda Indonesia
 - Citilink Indonesia
 - Lion Mentari Air
- Lombok – Denpasar (LOP – DPS) dilayani oleh 3 (tiga) Maskapai :
 - Garuda Indonesia
 - Wings Air Abadi
 - Lion Mentari Air
- Lombok – Sumbawa (LOP – SWQ) dilayani menggunakan 2 (dua) Maskapai :
 - Garuda Indonesia
 - Wings Air Abadi
- Lombok – Bima (LOP – BMU) dengan menggunakan 2 (dua) Maskapai :
 - Garuda Indonesia
 - Wings Air Abadi
- Lombok – Makassar (LOP – UPG) dengan menggunakan 2 (dua) Maskapai :
 - Garuda Indonesia
 - Lion Mentari Air

Sedangkan untuk rute Penerbangan Internasional yang dilayani melalui LIA, terdapat 2 (dua) destinasi yaitu :

- Lombok – Singapura (LOP – SIN) dengan menggunakan Maskapai Silk Air
- Lombok – Kuala Lumpur (LOP – KUL) dengan menggunakan Maskapai Air Asia Berhad
-

- b. Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa Besar :
- Rute Penerbangan Domestik yang dilayani melalui Bandara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa hanya menuju Lombok dengan menggunakan 2 (dua) Maskapai:
- Garuda Indonesia
 - Wings Air
- c. Bandar Udara Sultan M. Salahuddin Bima
- Terdapat 3 Rute Penerbangan Domestik yang dilayani melalui Bandara Sultan M. Salahuddin Bima menuju 3 destinasi yaitu :
- Bima – Lombok dengan menggunakan 2 (dua) maskapai
 - Garuda Indonesia
 - Wings Air
 - Bima – Denpasar dengan menggunakan 2 (dua) maskapai
 - Garuda Indonesia
 - Wings Air
 - Bima – Labuhan Bajo menggunakan 1 (satu) Maskapai
 - Susi Air

I.8. Kondisi Sektor Komunikasi dan Informasi

Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan transportasi dan komunikasi dan informatika, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang, sehingga arah pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta komunikasi dan informatika harus mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah dan memperkecil disparitas antar wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur dan penyebaran informasi program pembangunan daerah hendaknya bersinergi dengan program pembangunan pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mitra kerja sehingga mampu memberikan hasil yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Pada era keterbukaan saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan organisasinya. Negara Demokratis adalah Negara yang bisa menjamin anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi karena hak mendapatkan informasi termasuk juga salah satu hak asasi

manusia yang paling dasar sehingga keterbukaan informasi publik sangat penting sehingga pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga bisa menjadi salah satu sarana dalam memaksimalkan peran serta masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pada penyelenggaraan Negara, badan publik dan segala sesuatu yang berpengaruh pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan maksud untuk menyiapkan infrastruktur dasar dalam melayani masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi dari Pemerintah. Ketua PPID untuk provinsi NTB adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB. Salah satu tugas utama PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi sehingga badan publik bisa memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana untuk itu pada tahun 2016 Dishubkominfo Provinsi NTB melakukan beberapa kegiatan untuk Penguatan PPID baik di Tingkat Kabupaten/Kota Maupun SKPD lingkup Provinsi NTB melalui pelatihan operator PPID.

Selain memperkuat PPID di Daerah, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pelayanan yang efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya dengan penyediaan jaringan internet gratis melalui program Mobil Internet Keliling / *Mobile Community Acces Point(M-CAP)* serta program Kampung Media yang hingga saat ini telah memiliki sekitar 205 (dua ratus lima) komunitas se-NTB. Fokus utama program Kampung Media dalam beberapa tahun terakhir ini adalah untuk penguatan komunitas dimana penganggaran untuk program ini lebih ditekankan pada penguatan komunitas seperti berupa kegiatan Jambore Kampung Media dengan kegiatan pemberian penghargaan kepada komunitas yang berprestasi pada berbagai kategori.

I.9. Isu Strategis

Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 : Isu- Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

No.	Bidang	Masalah	Isu
1.	Perhubungan Darat	<p>8. Masih terbatasnya Pelayanan Sarana dan Prasaran Trasportasi Darat dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat guna Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah</p> <p>9. Masih Terdapatnya Daerah yang belum Terlayani Sarana Trasportasi Darat secara Optimal</p> <p>10. Masih kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Darat.</p> <p>11. Terbatasnya Peralatan Teknologi untuk Pengawasan dan Pemantauan Trasportasi yang Efisien dan Ramah Lingkungan</p> <p>12. Masih Terbatasnya Fasilitas Kelengkapan Jalan.</p>	<p>1. Rendahnya pelayanan angkutan umum (Publik Transport)</p> <p>2. Rendahnya kesadaran operator/pengusaha angkutan untuk taat aturan penyelenggaraan maupun operasi kendaraan.</p> <p>3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi.</p>
2.	Perhubungan Laut	<p>1. Masih terbatasnya Pelayanan Sarana dan Prasaran Trasportasi Laut dalam rangka Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat guna Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah</p> <p>2. Masih terdapatnya Daerah yang belum Terlayani Sarana Trasportasi Laut Secara Optimal</p> <p>3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional Pelabuhan di Prov. NTB</p> <p>4. Masih kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Laut.</p>	<p>1. Terbatasnya konektivitas Transportasi Laut.</p>
3.	Perhubungan Udara	<p>1. Terbatasnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional BIL, Bandara Sumbawa dan Bandara Bima di Prov. NTB</p> <p>2. Masih Kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan udara.</p>	<p>1. Terbatasnya konektivitas transportasi udara (Int'l)</p>
4.	Pos dan Telekomunikasi	<p>1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Peran serta Mitra Kerja.</p>	<p>1. Aksesibilitas Pos dan Telekomunikasi belum</p>

No.	Bidang	Masalah	Isu
		2. Terbatasnya Kewenangan dan Minim Koordinasi Pelaksanaan Program	optimal
5.	Bidang Sarana Komunikasi dan Desimenasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Peran serta Mitra Kerja / Lembaga Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemda, Media Massa, dan Lembaga Penyiaran 2. Terbatasnya Kewenangan dan Minim Koordinasi Pelaksanaan Program 	1. Sarana Komunikasi dan Desimenasi informasi belum optimal
6.	Balai Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sosialisasi Standart Mutu Layanan Komunikasi dan Informatika 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Konten dan Strategi Penyebaran Informasi 3. Belum Termanfaatkannya KIM sebagai Media Penyampaian Informasi 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Peran Mitra Kerja (KIM), Mitra Lembaga Penyiaran dan Media Cetak 5. Terbatasnya SDM Teknis Bidang Kominfo 	1. Informasi Publik belum Menyentuh Masyarakat secara Merata
7.	Balai Pengolah Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan SDM Teknis (TIK) 2. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan Komunikasi dan Informatika 3. Terbatasnya Kewenangan dan Minim Koordinasi Pelaksanaan Program 	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masih Terbatas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Dimana program yang telah ditentukan merupakan program – program unggulan dan menjadi prioritas SKPD sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam dokumen RPJMD program pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
11. Program Pengembangan Transportasi Udara;
12. Program Pengembangan Transportasi Laut;
13. Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
14. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
15. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa;
16. Program Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
18. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa;
19. Program Pengembangan Informasi Komunikasi Publik;
20. Program Fasilitasi Komisi Informasi.

Sedangkan program prioritas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

1. Peningkatan Jumlah Aparatur yang mengikuti DIKLAT;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat dan Laut;
3. Penurunan Angka Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;
4. Peningkatan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Angkutan Taxi, Angkutan Pariwisata yang Memiliki Legalitas (surat dan kelengkapan kelaikan jalan);
5. Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Laut;
6. Bertambahnya Rute Penerbangan Baru Internasional dan Domestik di NTB;
7. Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Udara;
8. Peningkatan Jumlah PPID (SKPD) Provinsi NTB dan Kab/Kota yang Menggunakan Aplikasi SIP-PPID;
9. Peningkatan Operator SIP-PPID SKPD Prov.NTB dan Kab/Kota se NTB yang sudah Terlatihnya;
10. Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (*RKPD Online, NTB Satu Data, SIPPID*);
11. Peningkatan Nilai rata-rata e-government Indonesia (PeGI).

Dari rumusan program dan kegiatan yang terangkum dalam RPJMD, menjadi salah satu dasar untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2018.

II.2 Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2016 jumlah program yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 17 program dengan 58 kegiatan, dari program dan kegiatan tersebut yang dimasukkan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi yang Memadai	1. Jumlah Koridor Angkutan Massal/Mataram Metro	1 Koridor
2.	Tersedianya Sistem Jaringan	1. <i>Jumlah Penumpang Angkutan</i>	<i>3.298.000 Orang</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Transportasi Udara yang Memadai	<p>Udara</p> <p>2. Jumlah rute baru Internasional dan Domestik yang beroperasi</p> <p>3. Terpantainya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara (BIL, Bima, Sumbawa)</p> <p>4. Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB</p> <p>5. Jumlah Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)</p>	<p>1 rute (Int)</p> <p>1 rute (Dom)</p> <p>3 Lokasi</p> <p>1 Dok</p> <p>90 Orang</p>
3.	Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi Laut yang Memadai	<p>1. Jumlah Penumpang Angkutan Laut</p> <p>2. Jumlah Rute pelayaran baru yang dibuka (Aik Bari – Pulau Moyo)</p> <p>3. Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Angkutan Laut pada Hari-hari Besar tertentu (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)</p> <p>4. Terbangun dan terpasangnya lampu menara suar</p> <p>5. Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan di NTB</p> <p>6. Jumlah Peserta Pembinaan / Sosialisai Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima)</p>	<p>172.025 Orang</p> <p>1 Rute</p> <p>3 Kali/Thn</p> <p>3 Unit</p> <p>1 Dok</p> <p>180 Orang</p>
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Seimbang / Proporsional	<p>1. Halte Angkutan Umum yang dibangun untuk Mendukung Trans Mataram Metro</p> <p>2. Jumlah Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa</p> <p>3. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa</p> <p>4. Panjang Marka Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi</p> <p>5. Jumlah Traffic Light yang di</p>	<p>44 Unit</p> <p>188 Unit</p> <p>20 Unit</p> <p>1.380 M²</p> <p>2 Unit</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pasang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> <p>6. Jumlah Warning Light yang di pasang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> <p>7. Panjang Pagar Pengaman Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> <p>8. Jumlah Paku Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> <p>9. Jumlah PJU Solar Cell terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> <p>10. Luas Terminal Ginte Dompou yang di Overlay</p>	<p>5 Unit</p> <p>500 m'</p> <p>1.000 Buah</p> <p>10 Unit</p> <p>500 m²</p>
5.	Tersedianya Data dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>1. Peringkat e-goverenment Indonesia (PeGI)</p> <p>2. Terlaksananya Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi melalui Layanan Gerbang Data dan M-Cap</p> <p>3. Terlaksananya Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Pertunjukan Media Tradisional, Pemutaran Film dan Siaran Keliling</p> <p>4. Terlaksananya Penguatan Komunitas Kampung Media melalui Jambore Kampung Media</p> <p>5. Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan TIK Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</p> <p>6. Jumlah Peserta sambung rasa antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</p> <p>7. Jumlah Peserta Bimtek Bidang Komunikasi dan Informasi</p>	<p>Peringkat 12</p> <p>12 bulan</p> <p>24 Keg. (Media Tradisional 4 kali, Pemutaran film 10 kali, Siaran Keliling 10 Kali)</p> <p>135 Orang</p> <p>20 Orang</p> <p>200 Orang</p> <p>30 Orang</p>
6.	Tersedianya Siaran / Informasi yang Edukatif	1. Jumlah SIPPPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB yang terbangun	10 SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Jumlah Operator SIP-PPID SKPD Prov.NTB dan Kab/Kota se NTB yang terlatih	30 Orang
7.	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	1. Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi berupa Usulan Program / Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo. 2. Dokumen Data Base Perhubungan Darat 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Pergub Tatrabil 4. Jumlah Petugas Operasional Jembatan Timbang yang terbayar honorinya 5. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo se NTB.	1 Dok 1 Dok 125 Orang 18 Orang 1 Dok
8.	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Terlaksananya Pengecatan Gedung Jembatan Timbang Bertais dan Poto Tano 2. Terlaksananya Kalibrasi/Tera Ulang Jembatan Timbang Bertais dan Poto Tano 3. Terlaksananya pemagaran Pelabuhan Telong-Elong 4. Terpeliharanya PJU dan Warning Light	2 Gedung 2 Lokasi 260 m 20 Unit
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat	1. Kendaraan Angkutan Umum yang Laik Jalan 2. Jumlah Peserta yang Tersosialisai tentang Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas 3. Jumlah pengusaha angkutan barang yang dibangun / disosialisasi 4. Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional 5. Terpilihnya Awak Angkutan	10 Kab/Kota 100 Orang 50 Orang 2 Orang (dari 20 peserta) 1 Orang (dari 20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Umum Teladan yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional</p> <p>6. Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB</p> <p>7. Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)</p> <p>8. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Memiliki Legalitas</p> <p>9. Jumlah Kendaraan Angkutan Taxi yang Memiliki Legalitas</p> <p>10. Jumlah Kendaraan Angkutan Pariwisata yang Memiliki Legalitas</p>	<p>peserta)</p> <p>4 Kegiatan</p> <p>3 Kali/Thn</p> <p>300 Unit</p> <p>600 Unit</p> <p>75 Unit</p>
10.	Meningkatnya Keterpaduan Sistem Pos dan Telekomunikasi	<p>1. Jumlah Peserta Pembinaan Jasa Titipan se NTB</p> <p>2. Terselenggaranya Pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB</p> <p>3. Terpantaunya penggunaan alat dan perangkat pos serta informatika yang beredar dipasaran lokal NTB</p> <p>4. Terlaksananya Pengawasan Layanan Tata Kelola Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) dan Terlaksananya Pelatihan Operator PLIK.</p> <p>5. Jumlah peserta penyuluhan peserta penggemar perangko dan filateli.</p>	<p>50 Orang</p> <p>10 Kab/Kota</p> <p>10 Kab/Kota</p> <p>10 Kab/Kota 40 Orang</p> <p>15 Orang</p>
11.	Meningkatnya Fasilitasi Komisi Informasi	1. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	12 Bulan
12.	Meningkatnya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.	<p>1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>2. Jumlah peserta Pelatihan Smart Driving dalam rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di NTB</p>	<p>1 Dok</p> <p>20 Orang</p>

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 602.470.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 1, indikator kinerja no : 1 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
2.	Program Pengembangan Transportasi Udara	Rp. 117.752.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 2, indikator kinerja no : 1 – 5 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
3.	Program Pengembangan Transportasi Laut	Rp. 734.149.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 3, indikator kinerja no : 1 – 6 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
4.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 934.218.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 4, indikator kinerja no : 1 - 10 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 1.212.012.700,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 5 dan 6 indikator kinerja no : 1 – 7 dan 1 – 2 dan mendukung indikator kinerja RPJMD no : 14.
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 627.614.200,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 7, indikator kinerja no : 1 – 5 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 367.802.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 8, indikator kinerja no : 1 – 4 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
8.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 1.499.435.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 9, indikator kinerja no : 1 – 10 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.
9.	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Rp. 314.686.650,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 10, indikator kinerja no : 1 - 5 dan mendukung indikator kinerja RPJMD no : 14.
10.	Program Fasilitasi Komisi Informasi	Rp. 489.400.000,-	Sumber Dana : APBD, mendukung sasaran strategis no : 11, indikator kinerja no : 1 dan mendukung indikator kinerja RPJMD no : 14.

11. Program Peningkatan Rp. 83.125.000,- Sumber Dana : APBD, mendukung Pengendalian Polusi sasaran strategis no : 12, indikator kinerja no : 1 – 2 dan indikator kinerja RPJMD no : 29.

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan sebagai motivasi dalam pencapaian tujuan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menandatangani Fakta Integritas untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah sesuai yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016. (lebih jelas dapat dilihat pada lampiran laporan ini).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu SKPD memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”**. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 di wujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter,
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan,
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan,
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing,
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah,
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang,
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dari misi tersebut yang sangat erat dengan sektor Perhubungan dan Kominfo adalah misi ke-1, misi ke-3 dan misi ke-6. Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan beberapa program strategis yang berkaitan dengan misi ke-1, ke-3 dan ke-6 adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,
2. Program pengembangan aplikasi informatika,
3. Program peningkatan Sumber Daya Aparatur,
4. Program peningkatan sarana dan fasilitas perhubungan,
5. Program peningkatan pelayanan angkutan,

6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, lebih jelas tergambar dalam tabel 3 da 4 di bawah ini.

Tabel 3 : Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai RPJMD 2013 – 2018

No.	Misi/Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1								
MEMPERCEPAT PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER MELALUI PEMANTAPAN KETAATAN BERAGAMA, PENINGKATAN BUDI PEKERTI DAN PENGEMBANGAN TOLERANSI								
f.	Tersedianya Siaran / Informasi yang edukatif	Edukasi, Mediasi dan Fasilitasi Siaran / Informasi yang diarahkan pada Lembaga Penyiaran	Mengembangkan Materi Siaran yang edukatif dan Membangun	Komunitas SIPPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB yang Terbangun (SKPD)	5	45	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo
MISI 3								
MEWUJUDKAN IKHTIAR REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI, PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DAN MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN								
e.	Tersedianya Data dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi dan Komunikasi	Fasilitasi, Sosialisasi dan Publikasi dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diarahkan pada Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan e-governmen	Mengembangkan Kebijakan, Kelembagaan, infrastruktur, SDM, Aplikasi dan Perencanaan e-governmen	Peringkat e-government Indonesia (PeGI)	Peringkat 12 (PeGI)	Peringkat 6 (PeGI)	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kominfo
MISI 6								
MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH BERBASIS TATA RUANG								
b.	Tersedianya Sarana Prasarana Wilayah yang Seimbang/Proporsional	Koordinasi, Konsultasi, Revitalisasi dan konstruksi Sarana Prasarana Wilayah yang diarahkan pada Sistem Perhubungan	Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta	Sarana Prasarana Perhubungan Darat yang Dibangun	Halte : 1 Unit Marka : 0 m Rambu : 1.250 unit	Halte : 20 Unit Marka : 4.000 m Marka : 2.500 unit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan

No.	Misi/Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Prioritas Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Provinsi NTB	Rmbu: 1.200 buah	Rmbu: 4000 buah		
					RPPJ : 50 unit	RPPJ : 200 unit		
					Marka : 600 m	Marka : 5000 m		
					Paku Jalan : 5000 buah	Paku Jalan : 7500 buah		
				Jumlah Kendaraan Angkutan Umum, Angkutan Taxi, Angkutan Pariwisata yang Memiliki Legalitas (Surat dan Kelengkapan Kelaikan Jalan)	Angkutan Umum : 417 unit	Angkutan Umum : 450 unit	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
					Angkutan Taxi : 555 Unit	Angkutan Taxi : 860 Unit		
					Angkutan Pariwisata : 150 unit	Angkutan Pariwisata : 300 unit		
				Pengadaan Lahan dan Konstruksi Jembatan Timbang Lembar (Area)	0	1		
				Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jembatan timbang Bertais dan Pototano (system)	0	1		

Tabel 4 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah aparatur yang mengikuti DIKLAT	Orang	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	50 orang
2.	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi								
	Sarana Prasarana Perhubungan Darat yang dibangun								
	- Halte	Unit	1	-	-	44	45	40	130
	Sarana prasarana perhubungan laut yang dibangun								
	- Dermaga	Unit	-	-	1	1	1	-	3
	- Gedung Kantor	Unit	-	-	1	1	-	-	2
	- Gedung Terminal	Unit	-	-	1	1	-	-	2
- Rambu Penuntun	Unit	-	-	1	1	-	-	2	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Pemagaran tanah Pelabuhan Labangka	M	-	-	800	-	-	-	800
	- Pemagaran terminal penumpang	M	-	-	-	300	-	-	300
3.	Menurunnya angka kematian akibat kecelakaan Lalu Lintas di jalan.	Kasus	482	478	473	467	461	455	455
4.	Jumlah Kendaraan Angkutan umum, Angkutan Taxi, Angkutan Pariwisata yang memiliki Legalitas (surat dan kelengkapan kelaikan jalan)								
	- Angkutan Umum	Unit	417	417	417	417	417	417	417
	- Angkutan Taxi	Unit	555	40	40	40	40	40	755
	- Angkutan Pariwisata	Unit	150	15	15	15	15	15	225
5.	Jumlah penumpang angkutan laut	Orang	125.794	138.373	153.594	172.025	197.828	227.502	227.502
6.	Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB	Rute	8 dom 3 Inter	8 dom 3 Inter	9 dom 4 Inter	10 dom 5 Inter	11 dom 5 Inter	12 dom 6 Inter	12 dom 6 Inter
7.	Jumlah penumpang angkutan udara	Orang	2.145.290	2.451.000	2.843.000	3.298.000	3.476.000	3.626.000	3.626.000

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	Jumlah PPID (SKPD) Provinsi NTB dan Kab/Kota yang menggunakan aplikasi SIP-PPID	Instansi	5	5	10	10	10	10	50
9.	Terlatihnya Operator SIP-PPID SKPD Prov.NTB dan Kab/Kota se NTB	Orang	30	30	30	30	30	30	150
10.	Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (<i>RKPD Online, NTB Satu Data, SIPPID</i>)	Orang	4.653	10.000	20.000	40.000	80.000	160.000	160.000
11.	Nilai rata-rata e-government Indonesia (PeGI)	Nilai rata-rata (PeGI)	2,23	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,20

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Analisis capaian kinerja adalah mengukur pencapaian visi yang ditetapkan dan dijabarkan didalam misi selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut oleh karena itu maka analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan sasaran yang ditetapkan dengan dukungan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB melaksanakan 11 (sebelas) program untuk mencapai 12 sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 adalah tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai dengan 1 indikator.

Tabel 5 Sasaran strategis 1 tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi yang Memadai	1. Jumlah Koridor Angkutan Massal/Mataram Metro	1 Koridor	4 Koridor	400 %

Untuk target jumlah koridor/trayek bagi angkutan masal/BRT pada tahun 2016 telah melewati target yang ditetapkan dari 1 koridor menjadi 4 koridor. Ditetapkannya 4 koridor dengan maksud agar angkutan masal/BRT tersebut beroperasi dengan wilayah yang lebih luas sehingga mendukung konektivitas dan aksesibilitas angkutan umum di Kota Mataram dan diharapkan masyarakat mau beralih untuk menggunakan angkutan umum.

Sasaran Ke 2 adalah tersedianya sistem jaringan transportasi udara yang memadai dengan 5 indikator kinerja.

Tabel 6 Sasaran Strategis 2 Tersedianya Jaringan Transportasi Udara Yang memadai

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tersedianya Sistem Jaringan	1. Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.298.000 Orang	3.778.787 Orang	114,57%

Transportasi Udara yang Memadai	2. Jumlah rute baru Internasional dan Domestik yang beroperasi	1 rute (Int) 1 rute (Dom)	0 2	0 200%
	3. Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara (BIL, Bima, Sumbawa)	3 Lokasi	3 Lokasi	100%
	4. Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dok	1 Dok	100%
	5. Jumlah Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumba	90 Orang	60 Orang	66,67%

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang tergambar dalam indikator kinerja maka di tetapkan program dan kegiatan pengembangan transportasi udara dengan 3 kegiatan utama

Tabel 7 Program Pengembangan Transportasi Udara

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan angkutan udara se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Penerbangan	Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara	3 lokasi (Loteng, Bima, Sumbawa)	3 lokasi (Loteng, Bima, Sumbawa)	100
		Peningkatan/ Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dok.	1 Dok.	100

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
		Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB	Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Bima, Sumbawa)	90 orang	60 orang	100

Program untuk mendukung pengembangan transportasi udara diarahkan langsung untuk memenuhi target pada indikator kinerja no 3, 4 dan 5 dimana untuk indikator no 3 pemantauan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasioanal Penerbangan) dan peralatan navigasi untuk keselamatan penerbangan dilakukan di 3 (tiga) lokasi bandara yang ada di NTB sehingga tidak terjadi gangguan pada penerbangan. Indikator kinerja ke 4 adalah pembuatan laporan tentang data fasilitas udara dimana laporan ini berguna sebagai dasar perencanaan pengembangan bandara baik disisi udara (Runway, Taxiway dan Apron) maupun di sisi darat (Terminal Penumpang) sehingga bandara udara bisa melayani kebutuhan maskapai maupun masyarakat pengguna jasa angkutan udara. Sedangkan untuk indikator ke 5 yaitu jumlah peserta sosialisasi tentang angkutan udara dari target 90 orang di 3 lokasi maka ada 1 (satu) kegiatan sosialisasi yang direncanakan akan diadakan di Kabupaten Lombok Tengah tidak diselenggarakan oleh Bidang teknis sehingga target hanya terpenuhi 60 orang di 2 Lokasi atau mencapai 66,67 % dari target karena adanya masa transisi ke undang-undang yang baru dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana pada undang-undang baru tersebut wewenang Provinsi untuk menangani angkutan udara ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dishubkominfo NTB juga melakukan pemantauan arus penumpang dan barang yang melalui Bandara yang digunakan sebagai dasar untuk meminta maskapai penerbangan untuk membuka rute baru penerbangan menuju wilayah Provinsi NTB. Meskipun pada tahun 2016 tidak ada penambahan penerbangan internasional akan tetapi untuk penerbangan domestik telah dibuka 2 (dua) rute penerbangan baru dari Lombok Internasional Airport menuju Solo, Jawa Tengah yang dilayani oleh Maskapai Lion Air pada bulan Oktober. Selain itu Lion air pada bulan Desember juga membuka rute baru menuju Kupang, NTT.

Program pengembangan transportasi udara yang dilakukan pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah penumpang angkutan udara dimana pada indikator kinerja ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 3.298.000 orang yang juga merupakan target dari RPJMD menjadi 3.778.787 orang atau 114,57 % dari target. Meningkatnya Penggunaan transportasi udara juga disebabkan beberapa hal seperti dicabutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pelarangan penggunaan Hotel sebagai tempat rapat hal ini menyebabkan kembalinya diselenggarakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) di NTB. Wisata MICE ini didukung juga oleh Kementerian Pariwisata yang menetapkan 16 lokasi wisata MICE dimana Pulau Lombok termasuk salah satu destinasi tujuan yang ditetapkan. Disamping itu branding wisata halal yang diusung oleh Provinsi NTB diyakini makin menarik tingginya tingkat wisatawan yang datang berkunjung. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat banyak even-even nasional yang diselenggarakan di NTB seperti MTQ nasional ke 26 dan Pemeran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional. Meningkatnya penggunaan transportasi udara juga disebabkan semakin terjangkau biaya transportasi dengan kehadiran maskapai-maskapai Low Cost Carrier seperti Lion Air, Air Asia maupun CitiLink yang menuju Lombok Internasional Airport maupun 2 (dua) Bandara lainnya di Pulau Sumbawa.

Sasaran strategis ke 3 (tiga) adalah tersedianya sistem jaringan transportasi laut yang memadai dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Tabel 8 Sasaran Strategis 3 Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Tersedianya Sistem Jaringan Transportasi Laut yang Memadai	1. Jumlah Penumpang Angkutan Laut	172.025 Orang	1.071.173 Orang	622,68 %
		2. Jumlah Rute pelayaran baru yang dibuka (Aik Bari – Pulau Moyo)	1 Rute	-	-
		3. Terbangun dan terpasangnya lampu menara suar	3 Unit	3 unit	100 %
		4. Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan di NTB	1 Dok	1 Dok	100 %
		5. Jumlah Peserta Pembinaan / Sosialisai Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima,	180 Orang	180 Orang	100%

		KLU, Lobar)			
--	--	-------------	--	--	--

Untuk mendukung sasaran tersebut maka ditetapkan program pengembangan transportasi laut dengan 3 kegiatan.

Tabel 9 Program Pengembangan Transportasi Laut

PROGRA M	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembang an Transportasi Laut	Meningkatnya pengembangan keselamatan pelayaran dan angkutan laut se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Pembangunan Menara dan Lampu Suar	3 Lokasi (Tanjung Kesi, Pulau Nisarate dan Tanjung Pasir)	3 Lokasi (Tanjung Kesi, Pulau Nisarate dan Tanjung Pasir)	100
		Peningkatan/ pengembangan kepelabuhan di NTB	Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB	1 dokumen	1 dokumen	100
		Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Pembinaan/Sosia lisai pengusaha Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima, Lobar, Dompu)	180 orang	180 orang	100

Program untuk pengembangan transportasi laut dilakukan untuk memenuhi target dari indikator kinerja no 3,4 dan 5 dimana indikator 3 adalah pembangunan sarana navigasi laut yang berguna sebagai salah satu alat bantu bagi keselamatan pelayaran yang melewati wilayah NTB. Sementara untuk target indikator ke 4 adalah upaya dari Dishubkominfo NTB untuk mendata fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di NTB untuk menjadi salah satu bahan untuk menganalisa kondisi terkini pelabuhan yang ada di NTB sehingga perencanaan pengembangan pelabuhan dapat dilakukan dengan baik. Untuk indikator Ke 5 merupakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pelabuhan seperti Perusahaan Bongkar Muat Perusahaan Pengurusan Jasa Transportasi dan perusahaan – perusahaan pelayaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pelabuhan sebagai pintu masuk orang dan barang dapat menjadi optimal.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD maka Dishubkominfo Prov.NTB guna meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran terutama untuk pengawasan kapal cepat dari provinsi Bali yang menuju Kawasan 3 (tiga) gili di Pulau Lombok maka Dishubkominfo NTB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 552, 11 – 809 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, pengusaha kapal cepat dan stakeholder lainnya untuk mengawasi keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Provinsi NTB sehingga diharapkan dapat terwujud transportasi laut yang aman dan nyaman dan juga untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan 3 Gili yang merupakan kawasan konservasi Nasional.

Pengembangan kepelabuhan dan angkutan laut di NTB juga terus diusahakan oleh Dishubkominfo NTB bekerjasama dengan stakeholder lainnya guna memperlancar arus barang maupun orang yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya logistik sehingga disparitas harga dengan barang-barang di luar daerah tidak terlalu besar. Pada bulan Desember tahun ini PT. ASDP telah membuka rute baru dari Surabaya- ke Pelabuhan Lembar dengan mengoperasikan Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Legundi. Pengoperasian kapal ini juga merupakan salah satu dukungan untuk program tol laut yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik untuk daerah-daerah luar Jawa. Disamping itu guna meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi meningkatnya arus Barang maupun kapal pesiar yang datang ke Pulau Lombok maka PT. Pelindo III pada tahun 22 Desember 2016 telah melakukan Groundbreaking Pembangunan Terminal Baru yaitu Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat.

Dengan adanya program dan kegiatan pengembangan transportasi laut tersebut maka indikator kinerja no 1 yaitu jumlah penumpang angkutan laut pada tahun 2016 telah mencapai 1.071.173 orang yang di data dari 5 pelabuhan laut yang ada di NTB yaitu Pelabuhan Bima, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Senggigi dan Pelabuhan Pemenang. Jumlah penumpang laut ini jauh melampaui target yang ditetapkan pada indikator kinerja maupun target RPJMD yaitu 172.025 orang atau mencapai 622,68 % dari target.

Sementara itu untuk rute pelayaran baru dari Aik-Bari menuju pulau Moyo belum bisa dilakukan karena Pelabuhan Aik Bari belum dibangun akan tetapi lokasi pelabuhan Aik-Bari berhasil dimasukkan kedalam Keputusan Menteri Perhubungan KP.901 tahun 2016 tentang Rencana Induk pelabuhan Nasional sehingga akan mempermudah proses pembangunan pelabuhan di lokasi tersebut..

Sasaran strategis ke 4 adalah tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dan proporsional dengan 10 indikator kinerja.

Tabel 10 Sasaran Strategis ke 4 Tersedianya sarana dan Prasaran Wilayah yang Seimbang dan Proporsional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Seimbang / Proporsional	1. Halte Angkutan Umum yang dibangun untuk Mendukung Trans Mataram Metro	44 Unit	8 Unit	18,18 %
		2. Jumlah Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	188 Unit	105 Unit	55.85%
		3. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	20 Unit	20 Unit	100 %
		4. Panjang Marka Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	1.380 M ²	-	-
		5. Jumlah Traffic Light yang di pasang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	2 Unit	1 Unit	50 %
		6. Jumlah Warning Light yang di pasang di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	5 Unit	5 Unit	100 %
		7. Panjang Pagar Pengaman Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	500 m'	-	-
		8. Jumlah Paku Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	1.000 Buah	-	-

		9. Jumlah PJU Solar Cell terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	10 Unit	-	-
		10. Luas Terminal Ginte Dompu yang di Overlay	500 m ²	-	-

Untuk mencapai sasaran strategis ini maka ditetapkan 2 program yaitu program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan masing – masing 1 dan 4 kegiatan.

Tabel 11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	Pembangunan Halte Angkutan Massal/BRT	18 unit	8 unit	44.44
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Rambu 105 buah	Rambu 105 buah	100
			Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	20 buah	20 buah	100
		Pengadaan Traffic Light	Traffic Light Terpasang di Kab. Sumbawa	1 Unit	1 Unit	100
		Pengadaan Warning Light di Kota Mataram	Warning Light terpasang	5 unit	5 unit	100

Bila dilihat dari target indikator kinerja untuk sasaran strategis ke 4 maka sepertinya banyak yang tidak tercapai hal ini sebenarnya disebabkan oleh berkurangnya target yang ada di DPA Dishubkominfo dimana untuk indikator no 1 targetnya adalah 18 Unit dan terealisasi 8 Unit atau 44,44 % dikarenakan kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaannya, sementara itu untuk indikator kinerja no 2 target dalam DPA adalah 105 unit sehingga realisasinya adalah 100 %, sedangkan target indikator no 3 dan no 6 realisasinya juga mencapai 100 %, untuk target indikator kinerja no 5 hanya ada 1 unit yang menjadi target di DPA Dishubkominfo NTB dan ini berarti realisasinya mencapai 100 %. Indikator Kinerja yang lain yaitu no 4, 7, 8, 9 dan 10 tidak tercapai karena tidak tersedianya anggaran untuk mencapai indikator kinerja tersebut di dalam DPA Dishubkominfo NTB dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan yang diutamakan.

Pelaksanaan program pembangunan sarana dan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dapat dilihat dengan telah beroperasinya BRT pada tahun 2016 sebagai sarana angkutan massal di Kota Mataram dengan menggunakan halte dan bustop sebagai tempat untuk naik dan turunnya penumpang. Sementara itu pembangunan rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor pada tahun 2016 rasio kendaraan yang terlibat adalah sebesar 0.229 % atau sejumlah 3.017 unit kendaraan dari 1.316.495 unit kendaraan yang ada di NTB

Sasaran strategis ke 5 adalah tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan 7 indikator kerja

Tabel 12 Sasaran Strategis ke 5 Tersedianya Data dan Layanan Informasi Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tersedianya Data dan Layanan Informasi	1. Peringkat e-goverenment Indonesia (PeGI)	Peringkat 12	Peringkat 11	109 %

Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	2. Terlaksananya Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi melalui Layanan Gerbang Data dan M-Cap	12 bulan	12 bulan	100%
	3. Terlaksananya Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Pertunjukan Media Tradisional, Pemutaran Film dan Siaran Keliling	24 Keg. (Media Tradisional 4 kali, Pemutaran film 10 kali, Siaran Keliling 10 Kali)	18 Keg (Media Tradisional 5 kali, Pemutaran film 2 kali, Siaran Keliling 11 Kali)	75%
	4. Terlaksananya Penguatan Komunitas Kampung Media melalui Jambore Kampung Media	135 Orang	125 Orang	92,59%
	5. Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan TIK Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	20 Orang	20 Orang	100 %
	6. Jumlah Peserta sambung rasa antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	200 Orang	200 Orang	100 %
	7. Jumlah Peserta Bimtek Bidang Komunikasi dan Informasi	30 Orang	200 Orang	666,67%

Untuk mendukung sasaran tersebut maka di tetapkan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan 4 kegiatan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sekolah/Madrasah yang diberikan layanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobile-Community Access Point)	1 tahun	1 tahun	100
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui :	3 kegiatan	3 kegiatan	100
			- Pertunjukan Rakyat	5 Kali	5 Kali	100
			- Pemutaran Film	5 kali	2 kali	40
			- Siaran Keliling	10 kali	11 kali	110
		Penguatan Komunitas Kampung Media.	Penguatan dan Kemandirian Kampung Media melalui Jambore Kampung Media	35 Orang	125 Orang	357
		Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Sambung Rasa KIM	200 Orang	200 Orang di 10 Kab/Kota	100
			Bimtek Pemanfaatan TIK Pemberdayaan KIM	20 Orang	20 Orang	100

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Peserta Bimtek Bidang Kominform se NTB yang dilatih	350 Orang	200 Orang di 4 Kab/Kota se NTB (KLU, KSB, Lotim, Lobar)	57,14

Indikator kinerja pada no 2, 5, dan 6 telah mencapai 100 % dimana kegiatan pada indikator kinerja no 2 adalah mengenalkan dan memasyarakatkan internet sehat ke sekolah-sekolah yang ada di NTB selama 1 tahun dengan menggunakan *Mobile Community Access Point (M-Cap)*. Pengenalan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi tentang internet sehat sejak dini kepada remaja sehingga mereka bisa menggunakan internet secara bijak. Sedangkan untuk indikator no 5 dan no 6 adalah kegiatan untuk pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) agar mereka bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk penyebarluasan informasi di lingkungan mereka. Indikator kinerja no 3 menargetkan ada 24 kegiatan sementara di DPA Dishubkominform NTB target kegiatan adalah 21 kegiatan dan berhasil melakukan 18 kegiatan yang berarti 85,71 % dari target. Fokus dari program untuk mendukung indikator no 3 ini adalah untuk menyebarkan informasi-informasi pembangunan bukan hanya melalui media elektronik tetapi juga menggunakan media tradisional seperti pertunjukan rakyat, pemutaran film maupun siaran keliling menggunakan mobil calling. Pada tahun 2016 belum mencapai target karena anggaran untuk kegiatan pemutaran film dialihkan untuk melakukan kegiatan siaran keliling guna mendukung pelaksanaan MTQ nasional ke 26 yang diadakan di Kota Mataram. Sedangkan untuk kegiatan Jambore Kampung media yang bertujuan memberikan apresiasi/ penghargaan kepada komunitas Kampung Media yang berprestasi memiliki target 35 Orang di DPA, kegiatan Jambore Kampung Media melibatkan 125 orang dari berbagai komunitas Kampung Media atau berhasil melewati target sebesar 357 %. Begitu juga dengan Bimtek Bidang komunikasi dan Informasi yang bisa melibatkan 200 Orang dari 4 kabupaten telah melewati target yang ditetapkan di indikator Perjanjian Kinerja.

Dengan program dan kegiatan tersebut ditambah dengan program dan kegiatan pada sasaran strategis ke 6 yaitu tersedianya siaran informasi yang edukatif maka Indikator Kinerja ke 1 dari sasaran strategis ke 5 yaitu peringkat PeGi dapat melampaui target

peringkat PeGi yang ditetapkan. PeGi adalah indeks e-Government Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pada tahun 2016 Provinsi NTB berhasil meraih peringkat 11 dimana ini telah melewati target dari indikator kinerja di Perjanjian Kinerja yang ditarget pada peringkat 12

Sasaran ke 6 adalah tersedianya siaran/informasi yang edukatif dengan 2 indikator kinerja

Tabel 13 Sasaran Strategis ke 6 Tersedianya Siaran/Informasi yang Edukatif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersedianya Siaran / Informasi yang Edukatif	1. Jumlah SIPPPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB yang terbangun	10 SKPD	45 SKPD	450 %
		2. Jumlah Operator SIP-PPID SKPD Prov.NTB dan Kab/Kota se NTB yang terlatih	30 Orang	45 Orang	150 %

Untuk mendukung sasaran ke enam ini maka ditetapkan program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa dan program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Tabel 14 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	SIP-PPID Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	10 SKPD	45 SKPD Provinsi (termasuk KORPRI) Dan 10 Kab/Kota	450

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Operator SIP-PPID SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang dilatih	30 orang	45 orang dari SKPD Lingkup Prov.NTB	150
--	--	---	---	----------	-------------------------------------	-----

Sasaran strategis ini berhasil melampaui target dari indikator kinerja sebesar 450 % untuk pemasangan aplikasi SIP-PPID di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan sebesar 150 % dari target untuk pelatihan Operator SIP-PPID hal ini bisa dicapai karena SIP-PPID merupakan salah satu alat bantu atau aplikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat karena itu masing-masing SKPD di Pemerintah Provinsi NTB harus memiliki aplikasi ini agar segera digunakan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, konsekwensi dari adanya aplikasi ini adalah harus tersedianya tenaga operator yang terampil dan handal dalam mengoperasikannya untuk itu maka operator SIP-PPID dimasing-masing SKPD lingkup Provinsi NTB perlu dilatih agar mampu memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat hal ini yang mendorong untuk menerapkan aplikasi dan pelatihan operator untuk seluruh SKPD lingkup Provinsi NTB. Pada tahun 2016 terdapat 7.672 pengunjung online SIP-PPID dengan total 10 Permintaan yang semuanya sudah dipenuhi. Selain itu pengunjung juga melakukan download Daftar Informasi Publik (DIP) sebanyak 3.798 kali dimana jumlah DIP di tahun 2016 adalah sejumlah 532 dokumen.

Dengan adanya kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) maka 45 SKPD sejak tahun 2013 telah memiliki PPID SKDP sehingga masing-masing SKPD telah juga membuat Website SKPD untuk membantu menyebarkan informasi publik yang ada di instansi nya masing-masing. Sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 tercatat ada 39 Dinas yang websitenya aktif, 1 SKPD yang tidak memiliki website dan 6 SKPD yang tidak aktif yang disebabkan server suspend. Dari 39 Website yang aktif tersebut terdapat 3 SKPD yang tidak mengupdate konten isi websitenya.

Sasaran ke 7 adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan 5 indikator kinerja

Tabel 15 Sasaran Strategis ke 7 Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Memadai

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	1. Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi berupa Usulan Program / Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo.	1 Dok	1 Dok	100 %
		2. Dokumen Data Base Perhubungan Darat	1 Dok	1 Dok / Aplikasi	100 %
		3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Pergub Tatrawil	125 Orang	-	-
		4. Jumlah Petugas Operasional Jembatan Timbang yang terbayar honorinya	18 Orang	32 Orang	177%
		5. Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo se NTB.	1 Dok	1 Dok	100 %

Sasaran ke 7 ini dicapai dengan didukung program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan 3 kegiatan

Tabel 16 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Honorarium Operasional Jembatan Timbang	32 orang	32 orang	100
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang bisa diakomodir ada 4 indikator dalam DPA Dishubkominfo sementara satu indikator yaitu indikator no 3 yaitu jumlah peserta sosialisasi perda tentang penyelenggaraan perhubungan tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga tidak terakomodir dalam DPA Dishubkominfo NTB.

Pada Triwulan IV tahun 2016 telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan semua stakeholder perhubungan guna mengevaluasi dan merumuskan program-program pada urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika sehingga terwujud sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Pada Rapat koordinasi ini dirumuskan laporan berupa rumusan bersama kesepakatan stakeholder Dishubkominfo NTB. Disamping itu untuk meningkatkan data base perhubungan terutama untuk pendataan fasilitas dan kelengkapan jalan maka di buat sebuah

aplikasi atau website berbasis data spasial atau lebih dikenal sebagai WebGis untuk mempermudah perencanaan dan analisa untuk kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan di jalan provinsi maupun jalan nasional. Kegiatan mendukung indikator no 4 berupa pemberian honorarium bagi 32 orang sesuai dengan DPA perubahan untuk petugas jembatan timbang yang dioperasikan di NTB. Begitu juga untuk laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur berhasil mencapai target 100%.

Sasaran ke 8 adalah meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ dengan 4 Indikator Kinerja

Tabel 17 Sasaran Strategis ke 8 Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ

8.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Terlaksananya Pengecatan Gedung Jembatan Timbang Bertais dan Poto Tano	2 gedung	-	-
		2. Terlaksananya Kalibrasi/Tera Ulang Jembatan Timbang Bertais dan Poto Tano	2 Lokasi	-	-
		3. Terlaksananya pemagaran Pelabuhan Telong-Elong	260 m	260 m	100%
		4. Terpeliharanya PJU dan Warning Light	20 Unit	20 Unit	100%

Sasaran strategis ke 8 ini di dukung oleh program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan 2 Kegiatan.

Tabel 18 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang.	Pemagaran Pelabuhan Telong- Elong	260 m	260 m	100
			Pemeliharaan PJU dan Warning Light	20 Unit	20 Unit	100

Pada DPA Perubahan Dishubkominfo Prov.NTB tahun 2016 indikator pertama dan kedua tidak dianggarkan kembali karena pengelolaan Jembatan Timbang sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Pusat sehingga pekerjaan fisik tidak dilakukan. Sedangkan untuk indikator ke 3 dan 4 dapat terealisasi 100 %. Dimana maksud dari kegiatan nya adalah untuk merawat sarana dan prasarana perhubungan yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya sehingga sarana dan prasarana tersebut tidak menjadi rusak dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sasaran ke 9 adalah meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat dengan 10 indikator kinerja

Tabel 19 Sasaran Strategis ke 9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat	1. Kendaraan Angkutan Umum yang Laik Jalan	10 Kab/Kota	Bantuan Operasional 25 Unit BRT	100 %
		2. Jumlah Peserta yang Tersosialisai tentang Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas	100 Orang	100 Orang	100 %
		3. Jumlah pengusaha angkutan barang yang dibangun / disosialisasi	50 Orang	50 Orang	100 %
		4. Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di	2 Orang (dari 20 peserta)	3 Orang	150 %

		Tingkat Nasional			
		5. Terpilihnya Awak Angkutan Umum Teladan yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	1 Orang (dari 20 peserta)	2 Orang	100 %
		6. Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB	4 Kegiatan	12 Kegiatan	300 %
		7. Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)	3 Kali/Thn	3 Kali/Thn	100 %
		8. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum yang Memiliki Legalitas	300 Unit	577 Unit	192 %
		9. Jumlah Kendaraan Angkutan Taxi yang Memiliki Legalitas	600 Unit	702 Unit	117 %
		10. Jumlah Kendaraan Angkutan Pariwisata yang Memiliki Legalitas	75 Unit	87 Unit	116 %

Untuk mencapai sasaran tersebut maka didukung dengan program peningkatan pelayanan angkutan.

Tabel 20 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Bantuan Operasional BRT	Bantuan Operasional BRT	25 Unit BRT	25 Unit BRT	100
		Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan	Jumlah Kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	975 unit (angkutan umum : 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata : 75 unit)	1366 unit (angkutan umum : 577 unit, taxi : 702 unit, pariwisata : 87 unit)	140
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalu lintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas	100 orang	100 orang	100
		Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu.	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)	100
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan	Sosialisasi dan Pembinaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100

		Jalan	Sosialisasi terhadap Pengusaha Angkutan Barang	50 orang	50 Orang	100
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	2 orang	3 orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Tanjung dan SMAN 1 Selong)	150
			Pemilihan Awak Angkutan Teladan	1 Orang	2 Orang (Pengemudi DAMRI dan Lombok Taxi)	200

Capain untuk sasaran strategis ke 9 secara rata-rata telah mencapai 100 % seperti indikator kinerja no 2 dan 3. Bahkan beberapa kegiatan melewati target dari indikator kinerjanya, ini terlihat pada indikator ke 6 yaitu terlaksananya Forum lalu lintas angkutan jalan yang menjadi wadah dan sarana menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masarakat. Dimana target indikator kinerja Forum LLAJ adalah 4 kegiatan tetapi pada DPA Perubahan mendapat tambahan dana sehingga bisa merealisasikan 12 kegiatan yang meliputi 1 kali sosialisasi Pergub tentang Forum LLAJ, 4 kali sosialisasi Standar Operasional Prosedur forum LLAJ dan 7 kali sosialisasi ke sekolah untuk keselamatan berkendara. Sementara untuk indikator no 1 yaitu kendaraan angkutan laik jalan dalam DPA perubahan dirubah untuk membantu operasional 25 unit angkutan massal BRT yang diharapkan dapat menjadi sarana angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah perkotaan sehingga bisa mengurangi kemacetan lalulintas.

Data menunjukkan terdapat 2.820 kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 yang meningkat dari 2.601 kejadian di tahun 2015. Untuk itu program-program berkendara yang berkeselamatan terus digalakkan setiap tahun baik untuk pelajar maupun pengemudi Angkutan Umum. Pada tahun 2016 pemilihan pelajar pelopor, pemilihan awak angkutan teladan yang merupakan kegiatan rutin diselenggarakan

setiap tahun dipilih lebih 1 orang dari target untuk dikirim mengikuti seleksi lomba tingkat nasional hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran sejak dini bagi pelajar dan pengemudi angkutan umum untuk berperilaku yang baik dalam berkendara di jalan raya. Begitu juga dengan indikator pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas tetap disenggarakan 3 kali setahun guna membantu pengendalian arus lalu lintas pada hari-hari besar keagamaan dan nasional.

Sasaran ke 10 adalah meningkatnya keterpaduan sistem pos dan telekomunikasi dengan 5 indikator kinerja

Tabel 21 Sasaran Strategis ke 10 Meningkatnya Keterpaduan Sistem Pos dan Telekomunikasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10.	Meningkatnya Keterpaduan Sistem Pos dan Telekomunikasi	1. Jumlah Peserta Pembinaan Jasa Titipan se NTB	50 Orang	50 Orang	100%
		2. Terselenggaranya Pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	10 Kab/Kota	3 Kab/kota	30 %
		3. Terpantaunya penggunaan alat dan perangkat pos serta informatika yang beredar dipasaran lokal NTB	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%
		4. Terlaksananya Pengawasan Layanan Tata Kelola Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) dan Terlaksananya Pelatihan Operator PLIK.	10 Kab/Kota 40 Orang	3 Kab/Kota 40 Orang	30 100%
		5. Jumlah peserta penyuluhan peserta penggemar perangko dan filateli.	15 Orang	15 Orang	100%

Pencapaian sasaran strategis ke 10 ini didukung dengan program pengembangan pos dan telekomunikasi dengan 5 kegiatan.

Tabel 22 Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembangan pos dan telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Pembinaan dan penertiban Jasa Titipan	Pengusaha Jasa Titipan Terbina	50 orang dari 50 Perusahaan	50 orang dari 50 Perusahaan	100
		Pengawasan layanan jasa telekomunikasi pada penyelenggara/ pengguna jasa komunikasi se NTB	Dokumen pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pameran Prangko dan Filateli	Pameran Prangko dan Filateli	1 kali pameran 15 orang	1 kali pameran 15 Orang	100 100
		Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan perangkat perangkat Postel se NTB	Laporan Jenis dan Merek, Type Alat serta Perangkat Pos dan Informatika yang Beredar atau Dipasarkan yang dipergunakan di Wilayah NTB yang memiliki standarisasi dan sertifikasi.	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK	Laporan Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Wilayah NTB	10 Kab/Kota	3 Kab/Kota PLIK Sentra Produktif (2 di Kab.Sumbawa, 4 di Mataram dan 2 di KLU	30
		Pelatihan Operator PLIK Kampung Media se NTB	Operator PLIK yang terlatih tetang IT	40 orang	40 Orang (Operator PLIK yang di kelola Kampung Media)	100

Capaian untuk 4 indikator kinerja telah mencapai 100 %, sedangkan untuk indikator kinerja no 4 yaitu terlaksananya pengawasan layanan tata kelola kewajiban pelayanan umum (KPU) hanya dilakukan di 3 Kab/Kota hal ini disebabkan karena sejak tahun 2015 Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) tidak beroperasi lagi karena sudah habis kontrak pelaksanaan kegiatannya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pada tahun 2016 hanya ada 8 (delapan) PLIK sentra produktif yang merupakan program PLIK khusus yang diharapkan dapat mengabungkan pengembangan bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Teknologi Informasi masih beroperasi di 3 Kab/Kota yaitu di Sumbawa 2 (dua) PLIK, Kota Mataram 4 (empat) PLIK dan KLU 2 (dua) PLIK. Disamping itu untuk meningkatkan kemampuan Operator PLIK dimana beberapa operator PLIK tersebut juga merupakan anggota komunitas Kampung Media yang merupakan program unggulan Dishubkominfo NTB maka dilaksanakan pelatihan untuk 40 orang guna meningkatkan kemampuan operator PLIK di bidang teknologi informasi.

Sasaran ke 11 adalah meningkatnya fasilitasi komisi informasi dengan 1 indikator kinerja

Tabel 23 sasaran Strategis ke 11 Meningkatnya Fasilitasi Komisi Informasi

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11.	Meningkatnya Fasilitasi Komisi Informasi	1. Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Sasaran strategis ini di capai dengan program pengembangan informasi komunikasi publik dengan 1 kegiatan

Tabel 24 Program Pengembangan Informasi Komunikasi Publik

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Komisariat KI (Komisi Informasi) yang difasilitasi	1 tahun Rp.384.472.400	1 tahun Rp.373.305.000	100 97.10

Indikator Kinerja dapat mencapai 100% didukung dengan kinerja Dishubkominfo pada tahun 2016 dengan segera membentuk panitia seleksi guna memilih komisioner Komisi Informasi yang baru sehingga kerja-kerja Komisi Informasi sebagai garda terdepan pendorong keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat uu 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk memperkuat Komisi Informasi maka dibentuk juga Sekretraiat yang membantu Komisioner Komisi Informasi dalam memenuhi tugas dan fungsinya. Salah satu tugas dan fungsi Komisi Informasi adalah memastikan Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik secara mudah, murah dan efisien. Adanya Komisi Informasi juga mendorong seluruh badan publik untuk melakukan upaya penyebaran informasi baik secara offline maupun secara online atau dengan membuat website.

Sasaran strategis ke 12 adalah meningkatnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca dengan 2 indikator kinerja.

Tabel 25 Sasaran Strategis Ke 12 Meningkatnya Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12.	Meningkatnya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.	1. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca 2. Jumlah peserta Pelatihan Smart Driving dalam rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di NTB	1 Dok 20 Orang	1 Dok -	100 % -

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung dengan program peningkatan pengendalian polusi dengan 1 kegiatan

Tabel 26 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

PROGRA M	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
			URAIAN	TARGET	REALISASI	
Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya Pengendalian Penurunan Emisi Gas Rummah Kaca	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100
			penurunan emisi gas rumah kaca	Rp. 32.125.000	Rp.27.379.800	85.2 3

Dalam mendukung Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Gas Rumah Kaca maka Dishubkominfo NTB selaku SKPD yang bertanggung jawab pada urusan perhubungan/transportasi perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca sehingga dapat memetakan dan menganalisa penyumbang gas rumah kaca dari sektor transportasi sehingga bisa merekomendasikan program atau aksi untuk menurunkan emisi tersebut sehingga perlu dibuat sebuah laporan. Sementara itu kegiatan pelatihan smart driving yang merupakan salah satu indikator kinerja untuk sasaran strategis ini tidak dilakukan di tahun 2016 karena ada keterbatasan anggaran maka kegiatan tersebut di hapus pada DPA Perubahan.

Dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 24.166.382.900,- yang terdiri dari Belanja Belanja Langsung sebesar Rp. 12.805.906.100,- dan Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 11.360.476.800,-

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk progress fisik mencapai 96,72 % dan progress keuangan mencapai 93,73%.

Dengan capaian progress fisik 96,72 % maka pelaksanaan program dan kegiatan selama 2016 relatif tidak mengalami hambatan berarti. Untuk Progress Keuangan mencapai 93,73 % terdapat sisa anggaran sebesar 6,27 % hal ini disebabkan oleh :

- Terdapat dana acres pada belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan-tunjangan lain).
- Terdapat sisa dana dari selisih penawaran dengan pagu anggaran.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tabel 27 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015			%	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016			%
				Uraian	Target	Realisasi		Uraian	Target	Realisasi	
1	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo.	1 Dokumen Rp.184.650.000	1 Dokumen Rp.178.889.200	100 96.88	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi berupa usulan program / kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo.	1 Dokumen Rp.302.686.900	1 Dokumen Rp. 299.469.600	100 98,94
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Jembatan Timbang Bertais	1 Aplikasi Rp.602.580.000	1 Aplikasi Rp.472.538.800	100 78.42	Honorarium Operasional Jembatan Timbang	32 Hari Rp.208.788.000	32Hari Rp.194.135.000	100 92,98
				Pemasangan CCTV di Jembatan Timbang Bertais	1 unit	1 unit	100	Pengadaan Mesin genset	2 Unit	2 unit	100
			Monitoring,	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Dokumen Laporan hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	100

			evaluasi dan pelaporan	hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.	Rp.52.698.250	Rp.51.463.000	97.66	monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.	Rp.56.139.700	Rp.54.497.500	97.07
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang.	Rehab Atap Gedung Jembatan Timbang Bertais	1Gedung Rp.100.000.000	1Gedung Rp. 97.650.000	100 97.65	Pemagaran Pelabuhan Telong-Elong	260 m Rp.225.700.000	260 m Rp. 218.260.000	100 96,70
				Rehab Musholla Jembatan Timbang Bertais	1Gedung	1Gedung					
			Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ.	Pemeliharaan PJU di Pulau Lombok	15 Unit Rp. 75.000.000	15 Unit Rp.73.568.000	100 98.09	Pemeliharaan PJU dan Warning Light	20 Unit Rp. 82.102.000	20 Unit Rp.81.250.000	100 99,57
3	Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kelaikan angkutan barang dan angkutan umum / penumpang di seluruh Kab/Kota P.Sumbawa	5 Kab/Kota (di P.Sumbawa) Rp.36.362.000	5 Kab/Kota (di P.Sumbawa) hasil temuan terdapat 30 unit kendaraan yg tidak laik jalan Rp.19.667.600	100 54.09	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	10 Kab/Kota Rp.40.167.000	Dialihkan ke bantuan Operasional BRT Rp.24.767.900	- 61,66

				Jumlah Kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	975 unit (angkutan umum : 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata : 75 unit)	1316 unit (angkutan umum : 544 unit, taxi : 685 unit, pariwisata : 87 unit)		Jumlah Kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	975 unit (angkutan umum : 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata : 75 unit)	1366 unit (angkutan umum : 577 unit, taxi : 702 unit, pariwisata : 87 unit)	140
			Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalulintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas	100 orang Rp. 57.670.000	100 orang Rp. 46.158.000	100 80.04	Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalulintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas	100 Orang Rp.120.081.800	100 Orang Rp.89.093.200	100 74,19
			Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terpilihnya Awak Angkutan Umum Teladan yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	1orang Rp. 94.518.000	1orang Rp.87.635.200	100 92.72	Awak Kendaraan Peserta pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan yg dipilih mewakili NTB di tingkat Nasional	1orang	2 orang (pengemudi Damri dan Pengemudi Lombok Taxi)	200
			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Aparat Dishubkominfo Kab / Kota peserta Koordinasi Penerapan Sistem Angkutan Umum Berbasis Angkutan Masal	40 orang (10 Kab/Kota se NTB) Rp. 50.949.000	40 orang (10 Kab/Kota se NTB) Rp. 47.090.300	100 92.43				

			Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu.	4 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.110.865.000	4 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.110.724.500	100 99,87	Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada hari-hari besar tertentu (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru)	3 kali/tahun Rp.383.290.600	3 kali/tahun Rp.369.724.600	100 96,46
			Pemilihan kota tertib lalu lintas (wahana tata nagraha)	Kota / Kab yang mewakili NTB di Tingkat Nasional sebagai Kota tertib Lalu Lintas	3 Kabupaten / Kota Rp.87.712.000	3 Kabupaten / Kota (Mataram, Sumbawa, Lombok Barat) Rp. 79.310.100	100 90,42	Kota / Kab yang dipilih untuk Mewakili NTB di Tingkat Nasional	3 kab/kota	8 kab/kota Kota Mataram (Piala WTN), Kab.Sumbawa, Lotim,Lobar(Piala WTN katagori Lalu Lintas), Kab Bima, KSB, Loteng, Kota Bima (Plakat WTN)	267
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	3 orang Rp. 37.355.000	3 orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram dan SMAN 1 Dompu) Rp. 33.447.600	100 89,59	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	2 Orang	3 Orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Tanjungdan SMAN 1 Selong)	150
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Aparat Dishubkominfo Kab / Kota yang di sosialisasi tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	270 orang Rp. 215.000.000	270 orang Rp.159.883.300	100 74,36	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 Kegiatan Rp. 2.764.868.000	12 Kegiatan Rp. 2.571.306.889	100 93

4	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	Halte Angkutan Umum yang dibangun	1 unit Rp.192.342.000	1 unit Rp.186.510.000	100 96.97	Halte Angkutan Umum/BRT yang dibangun	18 Unit Rp.602.470.000	8 Unit Rp.231.670.420	44.44 38.45
5	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	220buah Rp.660.834.000	220buah Rp.655.737.600	100 99.23	Jumlah Rambu Rambu Lalu Lintas Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di P.Lombok dan P.Sumbawa	105 buah Rp.289.228.000	105 buah Rp.288.280.000	100 99,67
				Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	66buah	66buah	100	Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi P.Lombok dan P.Sumbawa	20 buah	20 buah	100
			Pengadaan marka jalan	Marka Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Mataram	526 M ² Rp.187.182.400	526 M ² Rp.187.141.200	100 99.98	-	-	-	-
			Pengadaan pagar pengaman jalan	Pagar Pengaman Jalan Terpasang pada Ruas Jalan Provinsi di P.Lombok dan P.Sumbawa	220 M' Rp.397.450.000	220 M' Rp.311.390.000	100 78.35	-	-	-	-
			Pengadaan Warning Light	Pembangunan Warning Light	5 unit Rp.186.823.600	5 unit Rp.186.100.000	100 99,61	Pembangunan Warning Light di Kota Mataram	5 Unit Rp.192.000. 000	5 Unit Rp.192.000.000	100 100

								Pengadaan Traffic Light di kab.Sumbawa	1 unit	1 Unit	100
									Rp. 451.350.000	Rp.424.678.000	94,09
6	Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan angkutan udara se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Penerbangan	Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara	3 lokasi (BIL, Bima, Sumbawa) Rp.72.913.000	3 lokasi (BIL, Bima, Sumbawa) Rp.60.607.637	100 83.12	Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 Lokasi Bandara (BIL, Bima, Sumbawa)	3 lokasi	3 lokasi	100 90.74
			Peningkatan/ Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dok. Rp.61.518.000	1 Dok. Rp.49.251.150	100 80.06	Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 dok	1 dok	100 68.86
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB	Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)	90 orang Rp.105.688.000	90 orang Rp.104.349.196	100 98.73	Jumlah Peserta Sosialisai tentang Angkutan Udara di 4 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)	90 Orang	60 Orang (Bima dan Sumbawa)	66,67 76.39
				Jumlah Penumpang Angkutan Udara	2.843.000 orang	2.707.814orang	95	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.298.000 orang	3.778.787 orang	114
				Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB	1 rute	1 rute		Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB	1 rute	2 rute (Solo dan Kupang)	200

7	Pengembangan Transportasi Laut	Meningkatnya pengembangan keselamatan pelayaran dan angkutan laut se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Pameran Keselamatan Transportasi Laut dan Lomba Kapal Sehat	2 Kegiatan (Lokasi Pelabuhan Kayangan) Rp.260.000.000	2 Kegiatan (Lokasi Pelabuhan Kayangan) Rp.148.279.262	92.31 57.03	-	-	-	-
				Pemeliharaan rambu suar	3 Lokasi (Tj. Menangis Badas, P.Nisarate Kempo, Tj. Kesi Kempo)	3 Lokasi (Tj. Menangis Badas, P.Nisarate Kempo, Tj. Kesi Kempo)		Pembangunan Menara dan lampu suar (Tj.Kesi, P.Nisarate dan Tj.Pasir)	3 Lokasi Rp.485.178.000	3 Lokasi Rp.460.958.000	100 95.01
			Peningkatan/ pengembangan kepelabuhanan di NTB	Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB	1 dokumen Rp.50.000.000	1 dokumen Rp.49.846.759	100 99.69	Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB	1 Dokumen Rp. 50.524.500	1 Dokumen Rp.47.289.825	100 93.60
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Masyarakat Peserta Pembinaan/Sosialisai Tentang Angkutan Laut di 4 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima)	120 orang Rp.95.200.000	120 orang Rp.95.180.000	100 99.98	Jumlah Peserta Pembinaan/Sosialisai Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi Pelabuhan Laut (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima, Lobar dan KLU)	180 orang Rp.102.946.500	180 orang Rp.97.727.750	100 94.93
				Jumlah Penumpang Angkutan Laut	153.594 orang	801.433orang	100	Jumlah Penumpang Angkutan Laut	174.025 orang	1.071.173 orang	621
8	Pengembangan pos dan telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Pembinaan dan penertiban Jasa Titipan	Pengusaha Jasa Titipan Terbina	130 orang (dari 57 Perusahaan) Rp.50.000.000	130 orang (dari 57 Perusahaan) Rp.36.050.000	100 72.10	Jumlah Perusahaan Jasa Titipan Terbina	50 Orang dari 50 Perusahaan Rp.55.000.000	50 Orang dari 50 Perusahaan Rp.52.713.800	100 95.84

			Pengawasan layanan jasa telekomunikasi pada penyelenggara/pengguna jasa komunikasi se NTB	Dokumen pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	1 dokumen Rp. 23.750000	1 dokumen Rp. 22.894.700	100 96.40	Dokumen pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	1 Dokumen Rp.59.782.800	1 Dokumen Rp.50.763.380	100 95,84
			Pameran Prangko dan Filateli	Pameran Prangko dan Filateli	1 kali pameran Rp. 55.937.500	1 kali pameran Rp. 53.537.500	100 95.71	Terselenggaranya Pameran Prangko dan Filateli	1 kali Rp. 54.154.050	1 kali Rp. 52.228.300	100 96,44
			Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan perangkat Postel se NTB	Laporan Jenis dan Merek, Type Alat serta Perangkat Pos dan Informatika yang Beredar atau Dipasarkan yang dipergunakan di Wilayah NTB yang memiliki standarisasi dan sertifikasi.	1 dokumen Rp.23.475.000	1 dokumen Rp.21.869.000	100 93.16	Diperolehnya Informasi Jenis dan Merek, Type Alat serta Perangkat Pos dan Telekomunikasi yang beredar atau dipasarkan yang dipergunakan di Wilayah NTB	1 Dokumen Rp. 21.022.800	1 Dokumen Rp. 21.015.150	100 99,96
			Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK	Laporan Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Wilayah NTB	10 Kab/Kota (147 PLIK) Rp. 37.750.000	10 Kab/Kota (147 PLIK) Rp. 27.140.500	100 71.90	Terlaksananya Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Wilayah NTB	10 Kab/Kota Rp. 86.727.000	3 Kab/Kota dengan 8 PLIK Sentra Produktif (2 di Sumbawa, 4 di Mataram dan 2 di KLU) Rp. 79.645.500	30 91.83
			Pelatihan Operator PLIK Kampung Media se NTB	Operator PLIK yang terlatih tetang IT	30 orang Rp. 49.143.000	30 Orang Rp. 48.131.000	100 97.94	Pelatihan Operator PLIK	40 orang	40 orang (PLIK yng dikelola Kampung Media)	100

9	Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya Pengendalian Penurunan Emisi Gas Rummah Kaca	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca	1 dokumen Rp. 38.000.000	1 dokumen Rp.25.034.500	100 65.88	Laporan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca	1 dokumen Rp.32.125.000	1 dokumen Rp.27.379.800	100 85.23
10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sekolah/Madarasah yang diberikan layanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobile-Community Access Point)	1 tahun (15 kali di Lobar, Loteng, Lotim, KSB, Sumbawa, Dompu dan Bima Rp.150.000.000	1 tahun (15 kali di Lobar, Loteng, Lotim, KSB, Sumbawa, Dompu dan Bima Rp.141.876.320	100 94.58	Sekolah/Madarasah yang diberikan layanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobile-Community Access Point)	1 Tahun Rp.157.500.000	1 tahun Rp.139.317.020	100 88,46
			Pembinaan dan pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui :	3 kegiatan Rp.90.000.000	3 kegiatan Rp.84.356.823	100 93.73	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Pertunjukan Rakyat, Pemutaran Filem dan Siaran Keliling	3 kegiatan Rp.483.290.000	3 kegiatan Rp.449.323.407	100 92,97
			- Pertunjukan Rakyat		4 Kali	4 Kali		- Pertunjukan Rakyat	5 Kali	5 Kali	100
			- Pemutaran Film		8 kali	8 kali		- Pemutaran Film	5 kali	2 kali	40
			- Siaran Keliling		8 kali	8 kali		- Siaran Keliling	10 kali	11 kali	110
			Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informasi	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015	1 kali Rp.59.766.000	1 kali Rp.59.766.000	100 100	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

			Penguatan Komunitas Kampung Media.	Penguatan dan Kemandirian Kampung Media melalui :	95 orang/ 112 komunitas Rp.485.000.000	95 orang/ 112 komunitas Rp.443.674.045	100 91.48	Terselenggaranya Penguatan dan Kemandirian Kampung Media dengan kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				- Temu Kreatif Kampung Media	250 org/10 kegiatan	250 org/10 kegiatan					
				- Jambore Kampung Media	70 org/1 keg	70 org/1 keg		Jambore Kampung Media	35 orang/1keg. Rp. 483.290.000	125 orang/1keg. Rp. 449.323.407	357 92,97
			Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	SIP-PPID Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	10 SKPD Rp. 444.737.500	44 SKPD Provinsi dan 10 Kab/Kota Rp. 427.547.661	100 96.13	SIP-PPID Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	10 SKPD Rp.440.197.700	45 SKPD Provinsi (termasuk Korpri) dan 10 Kab/Kota Rp. 436.479.359	450 99,16
10.	Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Pengkajian terhadap penyebarluasan informasi pembangunan	Terciptanya kepekaan terhadap pelayanan public	20 media cetak/elektronik Rp. 46.852.000	20 media cetak/elektronik Rp.41.966.500	100 89.57	-	-	-	-
11.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM Aparatur bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Operator SIP-PPID SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang dilatih	20 orang Rp.33.850.623	20 orang Rp.29.850.000	100 88.18	Operator SIP-PPID SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang dilatih	30 Orang Rp.124.455.000	45 Orang pada SKPD lingkup Prov.NTB Rp.123.835.00	100 99,5

12.	Kerjasama Informasi dengan media massa	Meningkatnya kerjasama dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi tentang pembangunan daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media Lokal dan Nasional :	Rp. 517.253.377	Rp.491.604.627	100 99,50	-	-	-	-
				- Penerbitan Majalah	4 Kali	4 Kali	100	-	-	-	-
				- Cetak/Pemasangan Baliho	12 kali	12 kali	100	-	-	-	-
				- Media cetak	13 kali	13 kali (Lombok Pos 1x, suara NTB 12x)	100	-	-	-	-
				- Media Elektronik	3 Kali	3 Kali (sindo TV 2x, AN TV 1x)	100	-	-	-	-
				- Pers Trip	1 Kali	1 Kali	100 100	Pres Trip	2 Kali	2 Kali	100
13.	Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	Meningkatnya siaran/informasi yang edukatif kepada masyarakat	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Siaran Televisi	Program LPP yang dibina dan diawasi	20 LPP Rp.55.382.000	20 LPP Rp.55.376.800	99,99	-	-	-	-
14.	Fasilitasi Komisi Informasi	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Komisariat KI (Komisi Informasi) yang difasilitasi	1 tahun Rp.1.104.733.250	1 tahun Rp.1.080.723.424	100 97,83	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi	1 Tahun Rp.384.472.400	1 Tahun Rp.373.305.000	100 97,10

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan target RENSTRA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.

Tabel 28 : Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target RENSTRA

No.	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016			%	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			KET.
				Uraian	Target	Realisasi		Kegiatan	Target	Anggaran	
1	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo.	1 Dokumen Rp.302.686.900	1 Dokumen Rp.299.469.600	100 98,94	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	1 Keg	Rp. 175.000.000	Termasuk juga Pembuatan Database Perlengkapan perhubungan dengan Aplikasi WebGIS
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Honorarium Operasional Jembatan Timbang	32 Orang Rp.208.788.000	32 Orang Rp.194.135.000	100 92,98	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Pembangunan Gudang : 15 x 25 M2	1.500.000.000	Jembatan timbang pengelolaannya diambil Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan pada tahun 2017

				Pengadaan Genset	2 unit	2 unit	100		Pembangunan Mess di Jembatan Timbang Tano: 100 M2	400.000.000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.	1 Dokumen Rp.56.139.700	1 Dokumen Rp.54.497.500	100 97,07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10 Kab/Kota	Rp.70.000.000	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Jembatan Timbang	Pemagaran Pelabuhan Telong-elong	260 m Rp.225.700.000	260 m Rp.218.260.000	100 96,70	Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana dan prasarana Jembatan Timbang	Kalibrasi dan Tera JT.Tano dan JT.Bertais : 2 unit	Rp. 150.000.000	
			Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ.	Pemeliharaan PJU dan Warning Light	20 Unit Rp. 82.102.000	20 Unit Rp.81.250.000	100 99,57	Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ.	Pemeliharaan PJU di Pulau Lombok : 3 paket	Rp. 150.000.000	
								Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terminal Ginte : 500 m2	Rp. 4.000.000.000	
									Terminal Sumer Payung : 500 m2	Rp. 4.000.000.000	

3	Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kelaikan angkutan barang dan angkutan umum / penumpang di seluruh Kab/Kota P.Sumbawa	10 Kab/Kota Rp.40.167.000	- Rp.24.767.900	100 61,66	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	10 Kab/Kota	Rp. 100.000.000	Dialihkan untuk bantuan operasional BRT
				Jumlah Kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	975 unit (angkutan umum : 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata : 75 unit)	1366 unit (angkutan umum : 577 unit, taxi : 702 unit, pariwisata : 87 unit)					
			Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalulintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas	100 orang Rp. 120.081.800	100 orang Rp. 89.093.200	100 74,19	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	10 Kab/Kota	Rp. 100.000.000	
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terpilihnya Awak Angkutan Umum Teladan yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	1 orang	2 orang (Pengemudi Damri dan Lombok Taxi)	100	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	20 orang/ Kab/Kota	Rp. 150.000.000			

			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Sosialisasi terhadap Pengusaha Angkutan Barang	50 orang	50 orang dari 50 Perusahaan	100	Pembinaan/sosialisasi terhadap pengusaha angkutan barang	30 Perusahaan	Rp. 120.000.000	
			Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu.	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.383.290.600	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.369.724.600	100 96,46	Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	4 Kali	Rp. 250.000.000	
			Pemilihan kota tertib lalu lintas (wahana tata nugraha)	Kota / Kab yang mewakili NTB di Tingkat Nasional sebagai Kota tertib Lalu Lintas	3 Kabupaten / Kota	Kota Mataram (Piala WTN), Kab.Sumbawa, Lotim,Lobar(Piala WTN katagori Lalu Lintas), Kab Bima, KSB, Loteng, Kota Bima (Plakat WTN)	267	Pemilihan kota tertib lalu lintas (wahana tata nugraha)	10 Kab/Kota	Rp. 150.000.000	
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	2 orang	3 orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Tanjung dan SMAN 1 Selong)	150	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	20 Orang	Rp. 150.000.000	

			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sosialisasi dan Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	12 Kegiatan Rp. 2.764.868.000	12 Kegiatan Rp.2.571.306.889	100 93				
4	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	Halte Angkutan Umum yang dibangun	18 unit Rp.602.470.000	8 unit Rp.231.670.420	44,44 38.45	Tersedianya Halte	5 Unit	1.000.000.000	Tidak mencapai target meskipun Perusahaan Rekanan sudah diberikan tambahan waku dan didenda sesuai dengan aturan
5	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi	105 buah Rp.289.228.000	105 buah Rp.288.280.000	100 99.67	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu : 500 unit	Rp. 800.000.000	
				Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi	20 buah Rp.192.000.000	20 buah Rp.192.000.000	100		RPPJ : 50 unit		
			Pengadaan Traffic Light	Traffic Light terpasang di Kab. Sumbawa	1 Paket Rp.451.350.000	1 Paket Rp.424.678.000	100 94.09	Terpasangnya Traffic Light	2 Paket	Rp. 1.250.000.000	
			Pengadaan Warning Light	Waring Light terpasang di Kota Mataram	5 unit Rp.192.000.000	5 unit Rp.192.000.000	100 100	Pengadaan Warning Light	5 unit	Rp. 200.000.000	

6	Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan angkutan udara se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Penerbangan	Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara	3 lokasi (BIL, Bima, Sumbawa) Rp.52.038.200	3 lokasi (BIL, Bima, Sumbawa) Rp.47.220.260	100 90,74	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Penerbangan	3 lokasi	Rp. 115.000.000	
			Peningkatan/ Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dok. Rp.36.225.800	1 Dok. Rp.24.945.800	100 68.86	Peningkatan/ Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	3 lokasi	Rp. 70.000.000	
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB	Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Loteng, Bima, Sumbawa)	90 orang Rp.75.988.000	60 orang (Bima dan Sumbawa) Rp.58.047.325	100 76.39	Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB	Pembinaan Angkutan Udara : 3 lokasi	Rp. 120.000.000	
				Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.289.000 orang	3.778.787 orang	114	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.289.000.000 orang		
				Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB	1 rute	2 rute domestic (Solo dan Kupang)		Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB	1 rute domestic dan 1 rute Internasional		
7	Pengembangan Transportasi Laut	Meningkatnya pengembangan keselamatan pelayaran dan angkutan laut se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Pemeliharaan rambu suar	3 Lokasi (Tj.Kesi, P.Nisarate dan Tj.Pasir) Rp.485.178.000	3 Lokasi (Tj.Kesi, P.Nisarate dan Tj.Pasir) Rp.460.958.000	100 95,01	Terpeliharanya Lampu navigasi pelayaran	4 lokasi	Rp. 100.000.000	

			Peningkatan/ pengembangan kepelabuhan di NTB	Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB	1 dokumen Rp.50.000.000	1 dokumen Rp.49.846.759	100 99.69	Peningkatan/ pengembangan kesyahbandaran di NTB	3 Kali	Rp. 75.000.000	
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Pembinaan/Sosialisasi pengusaha tentang Angkutan Laut di 6 lokasi (Lotim,KSB,Sumbawa,Bima,Lobar,Dompus)	180 orang Rp.102.946.500	180 orang Rp.97.727.750	100 94.93	Terlaksananya sosialisasi Angkutan Laut	180 Orang	Rp. 80.000.000	
				Jumlah Penumpang Angkutan Laut	172.025 orang	1.071.173 orang		Jumlah Penumpang Angkutan Laut	172.025 orang		
8	Pengembangan pos dan telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Pembinaan dan penertiban Jasa Titipan	Pengusaha Jasa Titipan Terbina	50 orang Rp.55.000.000	50 orang Rp.52.713.800	100 95.84	Pembinaan dan penertiban Jasa Titipan	60 Perusahaan	Rp. 80.000.000	
			Pengawasan layanan jasa telekomunikasi pada penyelenggara/pengguna jasa komunikasi se NTB	Dokumen pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	1 dokumen Rp. 59.782.800	1 dokumen Rp. 50.763.380	100 84,91	Pengawasan layanan jasa telekomunikasi pada penyelenggara/pengguna jasa komunikasi se NTB	1 Kali	Rp. 80.000.000	
				Pameran Prangko dan Filateli	Pameran Prangko dan Filateli	1 kali pameran Rp. 54.154.050	1 kali pameran Rp. 52.228.300	100 96.44	Pameran Prangko dan Filateli	1 Kali	Rp. 200.000.000

			Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan perangkat Postel se NTB	Laporan Jenis dan Merek, Type Alat serta Perangkat Pos dan Informatika yang Beredar atau Dipasarkan yang dipergunakan di Wialayah NTB yang memiliki standarisasi dan sertifikasi.	1 dokumen Rp. 21.022.800	1 dokumen Rp.21.015.150	100 99,96	Pengawasan Standarisasi dan Sertifikasi Alat dan perangkat Postel se NTB	30 Perusahaan	Rp. 80.000.000	
			Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK	Laporan Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Wilayah NTB	10 Kab/Kota Rp. 86.727.000	10 Kab/Kota 8 unit PLIK Sentra Produktif di 3 Kab/Kota (Sumbawa 2, Mataram 4 dan KLU 2) Rp. 79.645.500	100 91.83	Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK	50 Lokasi	Rp.100.000.000	
			Pelatihan Operator PLIK Kampung Media se NTB	Pelatihan Operator PLIK	40 orang	40 Orang (Operator PLIK yang dikelola Kampung Media)	100	Pelatihan Operator PLIK se NTB	40 Orang	Rp. 225.000.000	
9	Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya Pengendalian Penurunan Emisi Gas Rummah Kaca	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca	1 dokumen Rp. 32.125.000	1 dokumen Rp.27.379.800	100 85.23	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 Tahun	Rp. 50.000.000	

10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sekolah/Madarasah yang diberikan layanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobile-Community Access Point)	1 tahun Rp.157.500.000	1 tahun Rp.139.317.020	100 88,46	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Layanan Gerbang Data/Internet dan M-Cap : 10 Kab/kota	Rp. 280.000.000	
			Pembinaan dan pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui :	3 kegiatan Rp.483.290.000	3 kegiatan Rp.449.323.407	100 92,97				
				- Pertunjukan Rakyat	5 Kali	5 Kali					
				- Pemutaran Film	5 kali	2 kali					
			- Siaran Keliling	10 kali	11 kali						
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informasi	Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2016	1 kali	1 kali	100 100	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan informasi	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional : 1 Keg	Rp. 90.696.000	Dipindah ke rekening untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
			Penguatan Komunitas Kampung Media.	Penguatan dan Kemandirian Kampung Media melalui Jamboree Kampung Media	35 orang Rp.483.290.000	125 orang Rp.449.323.407	100 92,97	Penguatan dan Kemandirian Kampung Media.	63 Komunitas	Rp. 500.000.000	

			Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	SIP-PPID Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	10 SKPD Rp. 440.197.700	45 SKPD Provinsi (termasuk Korpri) dan 10 Kab/Kota Rp. 436.479.359	450 99,16	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	10 SKPD	Rp. 1.300.000.000	
11.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM Aparatur bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Operator SIP-PPID SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang dilatih	30 orang Rp.124.455.000	45 orang dari SKPD Lingkup Provinsi Rp.123.835.000	100 99,50	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	30 Orang	Rp. 125.000.000	
	Fasilitasi Komunikasi Informasi	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Komisariat KI (Komisi Informasi) yang difasilitasi	1 tahun Rp.384.472.400	1 tahun Rp.373.305.000	100 97,10	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	1 tahun	Rp.2.000.000.000	

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional (tidak ada)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan

Rumusan Restra Dishubkominfo Prov.NTB diawali dengan penetapan visi yang dijabarkan menjadi misi kemudian dibuat tujuan dan sasaran untuk masing-masing misi selanjutnya ditetapkan rencana kerja tahunan sampai akhirnya ditetapkan perjanjian kinerja dan penetapan program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang ada. Dokumen restra tetap dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tahun 2016 merupakan kelanjutan program dari tahun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada rencana strategis 5 tahun. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tentu terdapat halangan dan hambatan. Seperti pada sektor Transportasi Darat untuk mencapai sasaran pembangunan halte untuk BRT telah ditetapkan dalam indikator kinerja untuk membangun 18 (delapan belas) unit halte tetapi hanya terbangun 8 (delapan) unit Halte.

Meskipun target pembangunan halte tidak tercapai tetapi tidak menghalangi beroperasinya BRT sebab pada tahun sebelumnya dan tahun 2016 Pemerintah Kota Mataram dan Kementerian Perhubungan juga turut membangun beberapa halte dan rambu bus stop. Disamping itu untuk operasional BRT, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI memberikan bantuan operasional agar BRT dapat beroperasi. Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana pada DPA Perubahan sebesar Rp. 24.767.900,- guna mengakomodir operasional BRT sementara itu Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana dengan pagu Rp.1.500.000.000,-. Kendala untuk tempat perhentian BRT yang terganggu karena tidak tercapainya target pembangunan 18 unit Halte tidak terlalu mengganggu operasional BRT karena pada tahun 2016 pemberhentian BRT menggunakan rambu Bus Stop baik yang sementara maupun yang sudah ada dan untuk tahun 2017 direncanakan akan di fokuskan untuk membangun rambu bus stop dan tangga sehingga dengan dana yang relative sama bisa mendapatkan unit yang lebih banyak.

Berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah berpengaruh pada sebagian kewenangan di bidang transportasi darat dimana 6 Terminal Tipe B diambil alih oleh Provinsi sedangkan terminal Tipe A dan 2 unit

Jembatan timbang diambil alih operasionalnya oleh Kementerian Perhubungan RI, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga melakukan persiapan dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota maupun dengan Kementerian Perhubungan terkait penyerahan asset dan personil untuk unit-unit yang akan diambilalih pengelolaannya sehingga program fisik untuk asset yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat tidak lagi dianggarkan walaupun program fisik tersebut tercantum pada renstra Dishubkominfo NTB. Disamping kegiatan yang dibiayai oleh APBD koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan tetap dilakukan oleh Dishubkominfo NTB seperti untuk membuka akses daerah terpencil dengan memberikan subsidi untuk angkutan perintis ke daerah-daerah terpencil tersebut. Pada tahun 2016 angkutan darat perintis dilaksanakan dengan melayani 7 (tujuh) trayek baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sementara itu kegiatan fisik yang dilakukan di sektor transportasi laut, udara dan kominfo pada Tahun 2016 banyak dilaksanakan melalui anggaran APBN. Kewenangan pada sektor-sektor tersebut memang lebih banyak berada di Kementrian Perhubungan maupun Kementerian Kominfo. Di sektor Laut terdapat 2 kegiatan fisik yaitu pemagaran pada fasilitas pelabuhan Telong-elong yang bertujuan untuk mengamankan asset pelabuhan yang dimiliki oleh provinsi dan pembangunan rambu suar di 3 lokasi di pulau Sumbawa untuk mendukung keselamatan pelayaran khususnya masalah navigasi di laut. Selain itu pada Tahun 2016 dimana terdapat indikator kinerja dengan membuka rute pelayaran Baru Aik Bari- Pulau Moyo meskipun pada tahun ini tidak dianggarkan tetapi berhasil memasukkan rencana lokasi pelabuhan di Keputusan Menteri Perhubungan KP.901 tahun 2016 tentang rencana induk pelabuhan

Kegagalan Capaian Kinerja lebih disebabkan karena target pada indikator Perjanjian Kinerja lebih mengedepankan target yang bersifat output dan bukannya outcome sehingga perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa adanya revisi perjanjian kinerja akan berpengaruh besar pada target indikator yang ditetapkan. Hal ini menjadi sebuah pelajaran/masukan agar dimasa yang akan datang penyusunan indikator perjanjian kinerja agar berorientasi pada outcome sehingga perubahan target program/kegiatan tidak mengganggu capaian kinerja.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dukungan sumber daya untuk pencapaian target telah dimaksimalkan, untuk sumber daya keuangan telah diupayakan melalui mekanisme pengusulan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan SKPD, bidang teknis yang menangani langsung kedua indikator ini adalah Bidang Perhubungan Udara dan Bidang Perhubungan Laut. Sedangkan untuk sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi khusus Bidang Transportasi Udara dan Transportasi Laut di lingkup SKPD masih dirasakan sangat kurang, untuk itu sejak Tahun 2014 Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan PPSDM (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Perhubungan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah (SMA) di NTB dan melakukan rekrutmen Taruna/Taruni untuk dididik dibidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dari jenjang D2 sampai S1. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada bidang teknis maka beberapa pegawai di tugaskan untuk mengikuti diklat sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang mendukung pekerjaannya.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2016 jumlah program yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 17 program dengan 57 kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 96,72 % dan realisasi keuangan mencapai 93,73 % dengan pencapaian ini secara umum semua program kegiatan mencapai 100 % dan secara keuangan terdapat sisa anggaran sekitar 6,22 % hal ini merupakan sisa accres dari belanja tidak langsung yang merupakan gaji dan tunjangan pegawai, serta sisa lebih dari penawaran pekerjaan fisik.

Dari program dan kegiatan tersebut yang dimasukkan sebagai Perjanjian Kinerja (PK) pada Tahun Anggaran 2016 ada 11 program sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp.	602.470.000,-
2. Program Pengembangan Transportasi Udara	Rp.	117.752.000,-
3. Program Pengembangan Transportasi Laut	Rp.	734.149.000,-
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	934.218.000,-

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	1.212.012.700,-
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	1.627.614.200,-
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	367.802.000,-
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	1.499.435.000,-
9. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Rp.	314.686.650,-
10. Program Fasilitasi Komisi Informasi	Rp.	489.400.000,-
11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp.	83.125.000,-

Sebelas Program tersebut ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis dalam perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja menetapkan indikator kinerja setiap sasaran strategis dengan berorientasi output sehingga ketika terjadi perubahan pada DPA Dishubkominfo maka seolah-oleh indikator kinerja tersebut tidak tercapai tetapi sebenarnya didalam DPA ada target yang diturunkan outputnya ataupun ada program yang dihapus sehingga secara umum target di dalam DPA Dishubkominfo telah terpenuhi seperti terlampir dalam lampiran Lakip untuk pengukuran kinerja.

III.2. Realisasi Anggaran

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
1	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen Kesepakatan Hasil Koordinasi Berupa Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Hubkominfo.	1 Dokumen Rp. 302.686.900	1 Dokumen 299.469.600	100 98.94

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Honorarium Operasional Jembatan Timbang	32 orang Rp. 208.788.000	32 orang Rp. 194.13500	100 92,98
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Hubkominfo se NTB.	1 Dokumen Rp.56.139.700	1 Dokumen Rp.54.497.500	100 97,07
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang.	Pemagaran Pelabuhan Telong- Elong	260 m Rp.225.700.000	260 m Rp. 218.260.000	100 96,70
			Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ.	Pemeliharaan PJU dan Warning Light	20 Unit Rp. 82.102.000	20 Unit Rp.81.250.000	100 99,57
3	Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kelaikan angkutan barang dan angkutan umum / penumpang di seluruh Kab/Kota P.Sumbawa	10 Kab/Kota Rp. 40.167.000	Dialihkan menjadi bantuan Operasional BRT/Angkutan Massal Perkotaan Rp. 24.767.900	61,66

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
			Pengawasan dan Penertiban Perijinan Angkutan	Jumlah Kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	975 unit (angkutan umum : 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata : 75 unit) Rp. 58.286.000	1366 unit (angkutan umum : 577 unit, taxi : 702 unit, pariwisata : 87 unit) Rp. 52.890.000	140 90.74
			Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pelajar dan Kelompok pemerhati keselamatan lalulintas disekolah yang mendapat sosialisasi tentang ketertiban berlalu lintas	100 orang Rp. 120.081.800	100 orang Rp. 89.093.200	100 74.19
			Pengamanan dan Pengendalian arus lalu lintas	Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas pada Hari-hari Besar tertentu.	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.383.290.600	3 Kegiatan (Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru) Rp.369.724.600	100 96.46
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sosialisasi dan Pembinaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	12 Kegiatan Rp.2.764.868.000	12 Kegiatan Rp.2.571.306.889	100 93
				Sosialisasi terhadap Pengusaha Angkutan Barang	50 orang	50 Orang	100

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%	
				URAIAN	TARGET	REALISASI		
				Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat yang Mewakili NTB di Tingkat Nasional	2 orang	3 orang (SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Tanjung dan SMAN 1 Selong)	150	
				Pemilihan Awak Angkutan Teladan	1 Orang	2 Orang (Pengemudi DAMRI dan Lombok Taxi)	200	
4	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	Pembangunan Halte Angkutan Massal/BRT	18 unit Rp.602.470.000	8 unit Rp.231.670.420	44.44 38.45	
5	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu -Rambu Lalu Lintas Terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Rambu 105 buah Rp.289.228.000	Rambu 105 buah Rp. 288.280.000	100 99.67	
				Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ) terpasang di Ruas Jalan Provinsi di P. Lombok dan P. Sumbawa	20 buah	20 buah	100	
				Pengadaan Traffic Light	Traffic Light Terpasang di Kab. Sumbawa	1 Unit Rp.451.350.000	1 Unit Rp.424.678.000	100 94.09
				Pengadaan Warning Light di Kota Mataram	Waring Light terpasang	5 unit Rp.192.000.000	5 unit Rp.192.000.000	100 100

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
6	Pengembangan Transportasi Udara	Meningkatnya pengembangan keselamatan penerbangan, kebandarudaraan dan angkutan udara se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Penerbangan	Terpantaunya KKOP dan Fasilitas Keselamatan Penerbangan di 3 lokasi bandara	3 lokasi (Loteng, Bima, Sumbawa) Rp.52.038.200	3 lokasi (Loteng, Bima, Sumbawa) Rp.47.220.260	100 90,74
			Peningkatan/ Pengembangan Kebandarudaraan se NTB	Tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang Memenuhi Standar di NTB	1 Dok. Rp.36.225.800	1 Dok. Rp.24.945.800	100 68,86
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Udara se NTB	Peserta Sosialisai Tentang Angkutan Udara di 3 kab. Lokasi bandara (Bima, Sumbawa)	90 orang Rp.75.988.000	60 orang Rp.58.047.325	100 76,39
			Jumlah Penumpang Angkutan Udara	3.298.000 orang	3.778.787 orang	114	
			Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestik di NTB	1 rute domestic	2 rute domestik (Solo dan Kupang)	100	
7	Pengembangan Transportasi Laut	Meningkatnya pengembangan keselamatan pelayaran dan angkutan laut se NTB	Peningkatan/ Pengembangan Keselamatan Pelayaran	Pembangunan Menara dan Lampu Suar	3 Lokasi (Tanjung Kesi, Pulau Nisarate dan Tanjung Pasir) Rp.485.178.000	3 Lokasi (Tanjung Kesi, Pulau Nisarate dan Tanjung Pasir) Rp.460.958.000	100 95,01
			Peningkatan/ pengembangan kepelabuhanan di NTB	Data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB	1 dokumen Rp. 50.524.500	1 dokumen Rp.47.289.825	100 93,60

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
			Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB	Pembinaan/Sosialisasi pengusaha Tentang Angkutan Laut di 6 Lokasi (Lotim, KSB, Sumbawa, Bima, Lobar, Dompu)	180 orang Rp.102.946.500	180 orang Rp.97.727.750	100 94.93
				Jumlah Penumpang Angkutan Laut	172.025 orang	1.071.173 orang	622
8	Pengembangan pos dan telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Pembinaan dan penertiban Jasa Titipan	Pengusaha Jasa Titipan Terbina	50 orang dari 50 Perusahaan Rp.55.000.000	50 orang dari 50 Perusahaan Rp.52.713.800	100 95.84
			Pengawasan layanan jasa telekomunikasi pada penyelenggara/ pengguna jasa komunikasi se NTB	Dokumen pengawasan Layanan Jasa Telekomunikasi Pengguna Jasa Komunikasi se NTB	1 dokumen Rp. 59.782.800	1 dokumen Rp. 50.763.380	100 84.91
			Pameran Prangko dan Filateli	Pameran Prangko dan Filateli	1 kali pameran Rp. 54.154.050	1 kali pameran Rp. 52.228.300	100 96.44
			Pengawasan Standarisasi Alat dan perangkat Postel se NTB	Laporan Jenis dan Merek, Type Alat serta Perangkat Pos dan Informatika yang Beredar atau Dipasarkan yang dipergunakan di Wilayah NTB yang memiliki standarisasi dan sertifikasi.	1 dokumen Rp.21.022.800	1 dokumen Rp.21.015.150	100 99.96

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
			Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK	Laporan Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Wilayah NTB	10 Kab/Kota Rp. 86.727.000	3 Kab/Kota PLIK Sentra Produktif (2 di Kab.Sumbawa, 4 di Mataram dan 2 di KLU Rp. 79.645.500	30 91.83
			Pelatihan Operator PLIK Kampung Media se NTB	Operator PLIK yang terlatih tetang IT	40 orang	40 Orang (Operator PLIK yang di kelola Kampung Media)	100
9	Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya Pengendalian Penurunan Emisi Gas Rummah Kaca	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca	1 dokumen Rp. 32.125.000	1 dokumen Rp.27.379.800	100 85.23
10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Sekolah/Madaras ah yang diberikan layanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobile-Community Access Point)	1 tahun Rp.157.500.000	1 tahun Rp.139.317.020	100 88.46
				Pembinaan dan pengembangan sumber daya Komunikasi dan Informasi	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui :	3 kegiatan Rp.483.290.000	3 kegiatan Rp.449.323.407
				- Pertunjukan Rakyat	5 Kali	5 Kali	100
				- Pemutaran Film	5 kali	2 kali	40
				- Siaran Keliling	10 kali	11 kali	110

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			%
				URAIAN	TARGET	REALISASI	
			Penguatan Komunitas Kampung Media.	Penguatan dan Kemandirian Kampung Media melalui Jambore Kampung Media	35 Orang Rp.483.290.000	125 Orang Rp.449.323.407	357 92,97
			Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	SIP-PPID Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	10 SKPD Rp. 440.197.700	45 SKPD Provinsi (termasuk KORPRI) Dan 10 Kab/Kota Rp. 436.479.359	450 99.16
			Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Sambung Rasa KIM	200 Orang Rp. 96.500.000	200 Orang di 10 Kab/Kota Rp.91.894.000	100 95.23
				Bimtek Pemanfaatan TIK Pemberdayaan KIM	20 Orang	20 Orang	100
11.	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Operator SIP-PPID SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang dilatih	30 orang Rp.124.455.000	45 orang dari SKPD Lingkup Prov.NTB Rp.123.835.000	150 99.5
12.	Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	Terlaksananya Fasilitasi Komisi Informasi	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Komisariat KI (Komisi Informasi) yang difasilitasi	1 tahun Rp.384.472.400	1 tahun Rp.373.305.000	100 97.10

Sesuai Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dimana pada tahun 2016 ini adalah tahun ketiga dari 5 tahap pembangunan Nusa Tenggara Barat, Secara umum sasaran strategis dari program dan kegiatan fisik mencapai 96,72% dan keuangan 93,72%.

Hasil capaian kinerja diatas, lebih memotivasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi secara maksimal terhadap program kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, program – program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 terdiri dari Program Rutin Kesekretariatan, Program pada Urusan Perhubungan dan Program pada Urusan Komunikasi dan Informatika :

I. Program Rutin/Kesekretariatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan kegiatan diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaa jasa sumber daya air dan listrik, administrasi keuangan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan rutin SKPD dengan pagu sebesar Rp.1.766.596.250 dengan realisasi sebesar Rp. 1.637.039.519 atau 92,67%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pengadaan mobil dinas untuk menunjang pekerjaan dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor diharapkan program ini dapat mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor agar operasional kerja berjalan lebih lancar dan nyaman. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.691.106.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.647.900.205 atau 97,45%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup Dishubkominfo dengan memberi kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan dan diklat serta memberikan pembinaan mental dan fisik aparatur melalui kegiatan keagamaan dan olah raga. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.100.696.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.337.500 atau 96.66%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, sasaran dari program ini adalah untuk menyediakan dan menyampaikan dokumen capaian dan realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya,

menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.106.551.800 dengan realisasi sebesar Rp.106.381.800 atau 99,84%

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, program ini memiliki satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen aset/barang milik daerah diharapkan melalui kegiatan ini manajemen aset yang dikelola oleh Dishubkominfo Provinsi NTB dapat tertata dengan baik. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 45.770.300 dengan realisasi sebesar Rp.35.094.000 atau 76,67%
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan memiliki pagu anggaran sebesar Rp.567.614.600 dengan realisasi sebesar 548.102.100 atau 96,56% dimana sasaran dari program ini adalah meningkatnya koordinasi tentang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, komunikasi dan informatika se Nusa Tenggara Barat. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah : (1) mendapatkan satu dokumen kesepakatan hasil koordinasi berupa usulan program / kegiatan pembangunan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (2) Pembayaran honorarium operasional petugas Jembatan timbang (3) mendapatkan satu dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informatika se Nusa Tenggara Barat serta menyediakan aplikasi yang menjadi database perlengkapan jalan dengan menggunakan aplikasi Geospasial berbasis web atau WebGis.

II. Program dalam Urusan Perhubungan terdiri dari :

1. Bidang Perhubungan Darat :

Dalam Tahun Anggaran 2016 Bidang Perhubungan Darat melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan untuk memperlancar pelayanan Transportasi Darat di Provinsi NTB diantaranya :

- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 307.802.000,- dengan realisasi sebesar Rp.299.510.000 atau 97.31 % Program ini memiliki dua kegiatan yaitu Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan telong-elong dengan pekerjaan utama melaksanakan membangun pagar fasilitas pelabuhan tersebut, sedangkan kegiatan yang kedua adalah Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ dengan pekerjaan melakukan pemeliharaan terhadap 20 unit PJU (Penerangan Jalan Umum) dan Warning Light.

- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.366.693.400,- dengan realisasi sebesar Rp.3.107.782.589 atau 92.31%. Program ini memiliki beberapa kegiatan antara lain: kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas, kegiatan pemilihan kota tertib lalu lintas (wahana tata nagraha), pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan Kegiatan Forum Lalu Lintas dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna angkutan darat dapat lebih baik.
- 3) Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan pembangunan prasarana perhubungan darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 602.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231.670.420 atau 38,45%. Program ini melaksanakan pekerjaan pembangunan 8 unit halte untuk mendukung operasional BRT meskipun tidak mencapai target pembangunan 18 unit halte tetapi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI bisa mengoperasikan bus BRT di 4 (empat) koridor dengan menggunakan rambu bus stop baik yang permanen maupun sementara.
- 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas anggaran program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sejumlah Rp. 932.578.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 904.958.000 atau 97.04 %. Kegiatan program ini adalah untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sejumlah 105 buah, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 20 buah, dan pengadaan warning light sebanyak 5 unit.
- 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.125.000 dengan realisasi sebesar Rp.27.379.900 atau 85.23 % kegiatan ini untuk mendukung Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan membuat laporan tentang emisi dari sektor transportasi.

2. Bidang Perhubungan Udara :

Program Pengembangan Transportasi Udara, dengan kegiatan peningkatan/pengembangan keselamatan penerbangan se NTB indikator yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpantaunya KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) pada 3 lokasi bandara di NTB yaitu BIL, Sumbawa dan Bima, kegiatan berikutnya adalah peningkatan/pengembangan kebandarudaraan dengan indikator kegiatan tersedianya Data Fasilitas Kebandarudaraan yang memenuhi standar di NTB, dan kegiatan yang ketiga adalah peningkatan / pengembangan angkutan udara se NTB dengan kegiatan melaksanakan sosialisasi tentang angkutan udara kepada masyarakat yang berada di lingkaran bandara (BIL, Sumbawa dan Bima). Tahun 2016 dialokasikan dana sebesar Rp. 164.252.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 130.213.385 atau 79,28 %. Sementara untuk progress fisik mencapai 86,43% yang disebabkan karena adanya perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan karena anggaran tersebut direncanakan untuk menghadiri rapat/pertemuan fasilitasi udara yang biasanya diselenggarakan di luar daerah tetapi pada tahun 2016 pertemuan tersebut mayoritas diselenggarakan di dalam daerah. Selain itu terdapat 1 (satu) kegiatan sosialisasi angkutan udara yang tidak dilaksanakan karena adanya transisi menuju undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana kewenangan provinsi tentang angkutan udara diambil oleh pusat. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak menghalangi pencapaian target penumpang angkutan udara sebanyak 3.778.787 orang atau meningkat 14,57 % dari target yang ditetapkan sebanyak 3.298.000 orang.

3. Bidang Perhubungan Laut :

Tahun Anggaran 2016, Bidang Transportasi Laut melaksanakan tiga program yaitu Peningkatan /pengembangan keselamatan pelayaran, Peningkatan/pengembangan kepelabuhanan dan Peningkatan/Pengembangan angkutan laut dengan dukungan dana sebesar Rp. 638.649.000,- dengan realisasi sebesar Rp.605.975.575 atau 94,88%, kegiatan pada bidang laut :

- 1) Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran dengan melakukan pemeliharaan alat navigasi laut/menara suar di 3 lokasi yaitu Tanjung Kesi, pulau Nisarate dan Tanjung pasir.
- 2) Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhanan di NTB dimana indikator kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen data sarana dan prasarana kepelabuhanan di NTB.

- 3) Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut, pokok kegiatannya adalah melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Angkutan Laut di 6 (enam) lokasi Pelabuhan Laut yaitu Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kabupaten Bima, Lombok Barat dan Lombok Utara) peserta sosialisasi pada masing-masing lokasi sejumlah 30 orang, sehingga total peserta sebanyak 180 orang dari berbagai elemen masyarakat, pengusaha angkutan laut, masyarakat sekitar pelabuhan, pemerintah dan tokoh masyarakat.

III. Program dalam Urusan Komunikasi Dan Informatika :

Urusan Komunikasi dan Informatika selama Tahun Anggaran 2016 melaksanakan 5 (lima) program yang dijalankan oleh 2 (dua) Bidang dan 2 (dua) Balai yaitu :

1. Bidang Pos dan Telekomunikasi dengan program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi memiliki dana kelola sebesar Rp. 276.686.650 dengan realisasi sebesar Rp. 256.366.130 atau 92.66 %. Sasaran program pada bidang pos dan telekomunikasi adalah meningkatnya keterpaduan system Pos dan Telekomunikasi dengan kegiatan antara lain : melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha jasa titipan yang ada di NTB dengan melakukan pembinaan terhadap 50 orang yang berasal dari perusahaan jasa titipan, melakukan pengawasan layanan Jasa Telekomunikasi pada penyelenggara dan pengguna Jasa Komunikasi di 10 kabupaten/kota se-NTB, mengadakan pameran perangko dan filateli dengan tujuan sebagai salah satu upaya memajukan perfilatelian di Provinsi NTB dan sekaligus menjadikan pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat dari tingkat pelajar TK, SD, SMP, SMU, Mahasiswa dan pada umumnya bahwasanya perangko dan perfilatelian dapat menjadi ajang promosi diri, pariwisata dan informasi perkembangan pembangunan daerah melalui media gambar serta investasi yang tidak terduga nilainya, selain kegiatan di atas juga dilaksanakan kegiatan pengawasan standarisasi dan sertifikasi alat perangkat Pos dan Telekomunikasi se NTB dan kegiatan Pengawasan Layanan Tata Kelola PLIK di Provinsi NTB yang berjumlah 8 PLIK yang merupakan PLIK sentra produktif yang terdapat di 3 kab/kota. Pengawasan ini dilanjutkan juga dengan kegiatan pelatihan Operator PLIK sejumlah 40 orang yang merupakan pengelola PLIK oleh komunitas Kampung Media.
2. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Balai Pelayanan Informasi Publik dan Balai Pengolah Data Elektronik

1. program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan dukungan dana sebesar Rp.1.697.387.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1590.671.120 atau 93,71%. Sasaran dari program ini adalah untuk mengupayakan peningkatan jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi dengan kegiatan berupa Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan capaian indikator kinerja berupa pelaksanaan pembinaan ke Sekolah/Madrasah berupa pelayanan jaringan komunikasi dan informasi melalui layanan M-CAP (Mobil-Community Access Point). Sedangkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi memiliki indikator berupa penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui 3 kegiatan yaitu pertunjukan rakyat sebanyak 5 kali, pemutaran film 2 kali dan siaran keliling 11 kali pada tahun 2016 NTB menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke 26 untuk itu kegiatan pemutaran film dialihkan menjadi siaran keliling untuk mendukung acara tersebut. Kegiatan berikutnya adalah Penguatan dan Kemandirian Kampung Media yang dilakukan melalui Jambore Kampung Media dimana kegiatan ini yang diikuti 125 orang dari komunitas kampung media. Kegiatan ini selain merupakan ajang pembinaan dan silaturahmi antar komunitas disamping itu juga pada acara ini diberikan penghargaan untuk beberapa komunitas yang memiliki keunggulan pada masing-masing katagori. Dua kegiatan yang terakhir pada program ini adalah pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui kegiatan sambung rasa di 10 kabupaten/ kota di NTB disertai juga dengan pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 30 orang anggota KIM. dan kegiatan Penguatan kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada 45 SKPD Provinsi termasuk juga Korpri dan seluruh PPID di 10 Kab/Kota yang ada di NTB dengan membangun aplikasi SIP-PPID.
2. Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi dengan pagu sebesar Rp.124.455.000 dan realisasi Rp.123.835.000 atau 99.50 yang digunakan untuk 2 kegiatan yaitu a. pelatihan 45 orang operator SIP-PPID SKPD sehingga diharapkan masing-masing operator PPID di SKPD mampu melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. b. Kegiatan pelatihan bidang komunikasi di 4 kabupaten di NTB

3. Fasilitasi Komunikasi Informasi dengan sasaran program adalah meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika dengan kegiatan penguatan kelembagaan Komisi Informasi (KI) dimana pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp.384.472.400 dengan realisasi sebesar Rp.373.305.000 atau 99.50%. Program ini dihabiskan untuk memperkuat sekretariat Komisi Informasi guna mendukung kerja Komisioner Komisi Informasi.

Sementara itu pada RPJMD, Dishubkominfo bertanggungjawab pada indikator ke 29 yaitu jumlah penumpang Angkutan Udara dan Angkutan Laut. Target untuk kedua indikator tersebut berhasil melewati target yang ditetapkan dimana jumlah penumpang angkutan udara target RPJMD tahun 2016 sebanyak 3.298.000 orang sementara sampai desember 2016 tercatat ada 3.778.787 orang yang menggunakan transportasi udara di 3 bandara yang ada di NTB, data ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14,57 % dari target yang ditetapkan

Sementara untuk Jumlah Penumpang Angkutan Laut mengalami peningkatan yang signifikan dari target RPJMD Tahun 2016 sebesar 172.025 orang menjadi 1.071.173 orang, hal ini disebabkan makin banyaknya wisatawan yang menggunakan angkutan laut/kapal cepat menuju kawasan gili dan makin meningkatnya arus wisatawan yang menggunakan kapal pesiar/cruise yang berlabuh di Pelabuhan Lembar.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menindak lanjuti INPRES Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disajikan ini memuat seluruh pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Dalam pencapaian tujuan strategis prinsip tersebut sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan sumberdaya manusia dan sarana/prasarana kerja yang memadai.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2013 – 2018 menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 sebagai tahapan Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018. Selain itu RENSTRA menjadi tolok ukur capaian kinerja Tahun 2016. Dari indikator pencapaian kinerja didapatkan hasil capaian yang secara umum mencapai target.

V.1. Hambatan dan Permasalahan

Penyelenggaraan sektor Perhubungan khususnya transportasi darat, laut dan udara telah berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman dalam mendorong kegiatan pembangunan sektor-sektor lain terkait dengan upaya meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa. Namun demikian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Belum meratanya penyediaan prasarana fasilitas transportasi di seluruh Kabupaten/Kota di NTB;
2. Tingkat disiplin para pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan masih relatif rendah, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas cukup tinggi;

3. Terbatasnya sarana angkutan umum dari dan ke daerah-daerah terpencil dan potensial.

Kondisi beberapa angkutan umum kurang nyaman serta sering kali angkutan umum melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan rute/trayek yang sudah ditetapkan, sehingga banyak masyarakat ataupun pelajar yang menggunakan angkutan tersebut sudah mulai turun dan beralih menggunakan angkutan pribadi dan sepeda motor, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan menjadi meningkat akibat bertambahnya kendaraan pribadi.

V.2. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Penyelenggaraan transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sasaran pembangunan sektor transportasi diarahkan kepada upaya-upaya untuk memecahkan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui penyediaan sarana transportasi dan pembangunan berbagai prasarana perhubungan yang memadai.
2. Mengurangi angka kecelakaan dengan cara memeriksa kendaraan bermotor di jalan dan menambahkan perlengkapan jalan yang dapat memperingati pengemudi yang berlalu lintas di kawasan rawan kecelakaan.
3. Melakukan manajemen lalu lintas dan menyusun kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi sehingga prasarana jalan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, tanpa harus melakukan pelebaran jalan di dalam wilayah perkotaan.
4. Memberikan subsidi pada pengusaha angkutan penumpang umum yang mengoperasikan armadanya ke daerah-daerah terpencil dan potensial.
5. Pengembangan angkutan massal perkotaan (*Bus Rapid Transit*) di Kota Mataram yang telah dioperasikannya BRT pada 4 koridor yang meliputi wilayah Kota Mataram dan sebagian wilayah kabupaten Lombok barat. Dengan adanya angkutan massal yang terintegrasi dengan angkutan umum yang lain maka pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat terpenuhi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.

Lampiran – Lampiran :

- Lapiran 1 : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lapiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lapiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
- Lapiran 4 : Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
- Lapiran 5 : Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
- Lapiran 6 : Laporan Pendukung Lakip